



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH



SRI WAHYUNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Data dalam dokumen LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp862.829.334.913 dengan rincian Belanja Operasi Rp805.153.905.415 dan Belanja Modal Rp57.675.429.498

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada rangkuman pencapaian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100,00	100,00	100,00
		Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100,00	100,00	100,00
		Persentase rancangan produk hukum daerah	Persen	100,00	94,93	94,93

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM				
2	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		95,00	97,50	102,63
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	78,00	89,57	114,83
		Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	91,00	93,09	102,30
3	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	80,00	78,38	97,98
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	86,00	86,60	100,70
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	71,00	82,15	115,70
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50	86,46	101,13

Sumber: data Biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim Tahun 2025 diolah

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai/melebihi target capaian yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	2
E. SUMBER DAYA APARATUR.....	5
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	8
H. SARANA DAN PRASARANA.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
C. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	21
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
D. REALISASI ANGGARAN	105
BAB IV PENUTUP.....	130
LAMPIRAN	131

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan arah gerak operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Biro-biro yang diimplementasikan dalam mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah memiliki fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

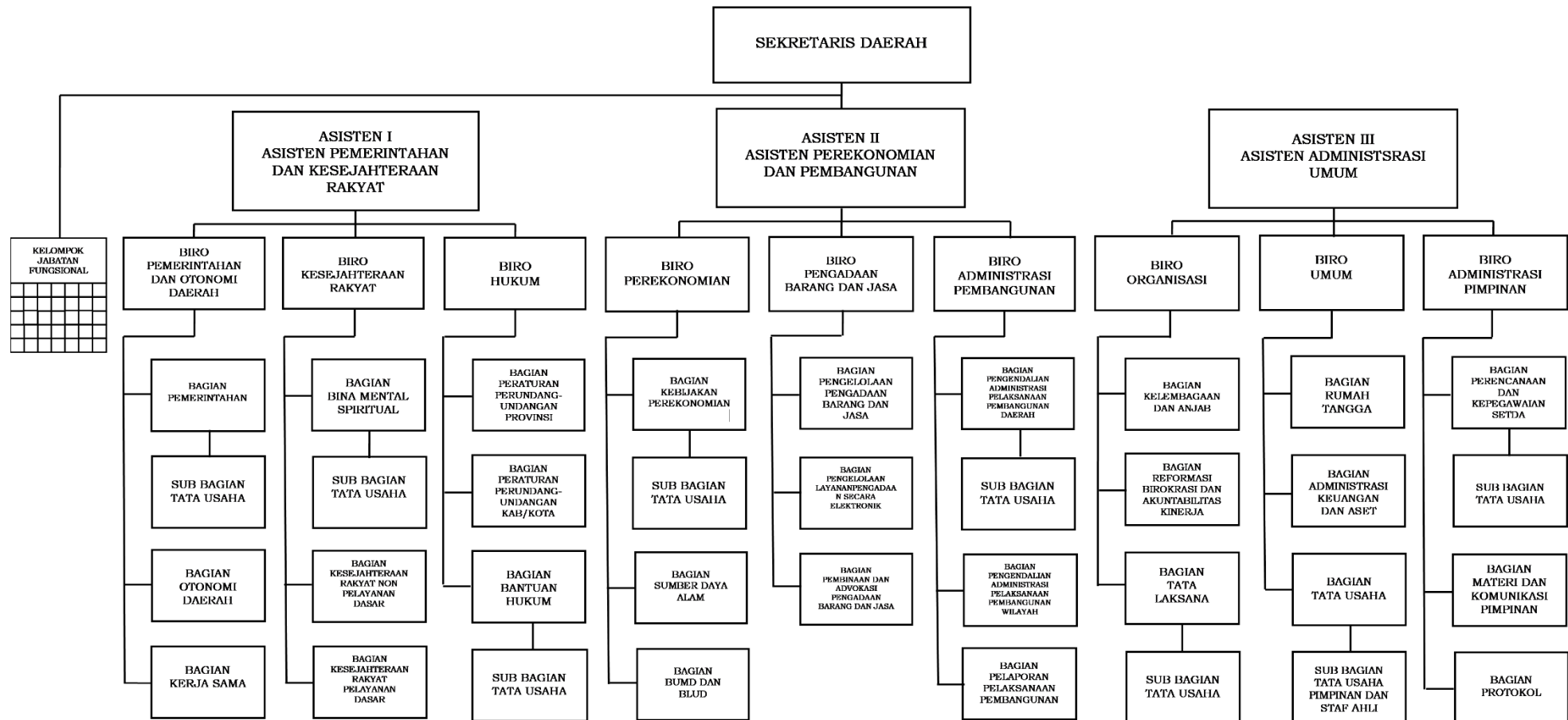
D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyesuaikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	PNS	P3K	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan						
				L	P	IV	III	II	I	P3K	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Asisten	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3	Staf Ahli	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	Tenaga Fungsional Utama	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Kepala Biro	9	-	4	5	9	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-
6	Kepala Bagian	23	-	14	9	18	5	-	-	-	-	18	5	-	-	-	-
7	Kepala Sub Bagian	8	-	3	5	2	6	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
8	Fungsional	84	10	57	37	21	63	-	-	10	-	23	69	2	-	-	-
9	Pelaksana	182	7	133	56	9	102	66	5	7	-	7	49	32	87	8	6
Jumlah PNS		312	17	215	114	65	176	66	5	17	1	65	128	34	87	8	6
		329		329		329					329						

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

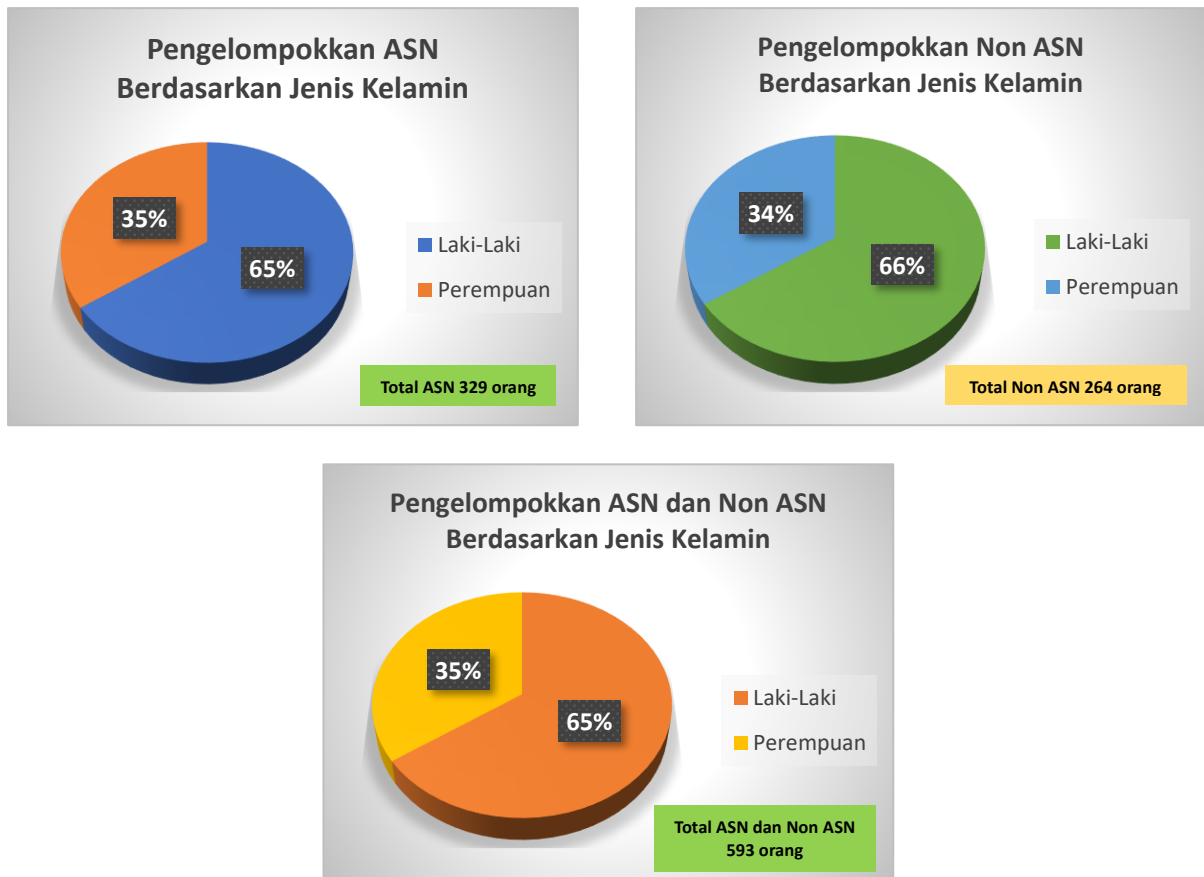
No	Jabatan	Jumlah Non PNS	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Tenaga Honor/PTT	264	173	91
Jumlah Non PNS		264	264	

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

Berdasarkan data di atas, Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) orang. 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) orang mayoritas pegawai adalah

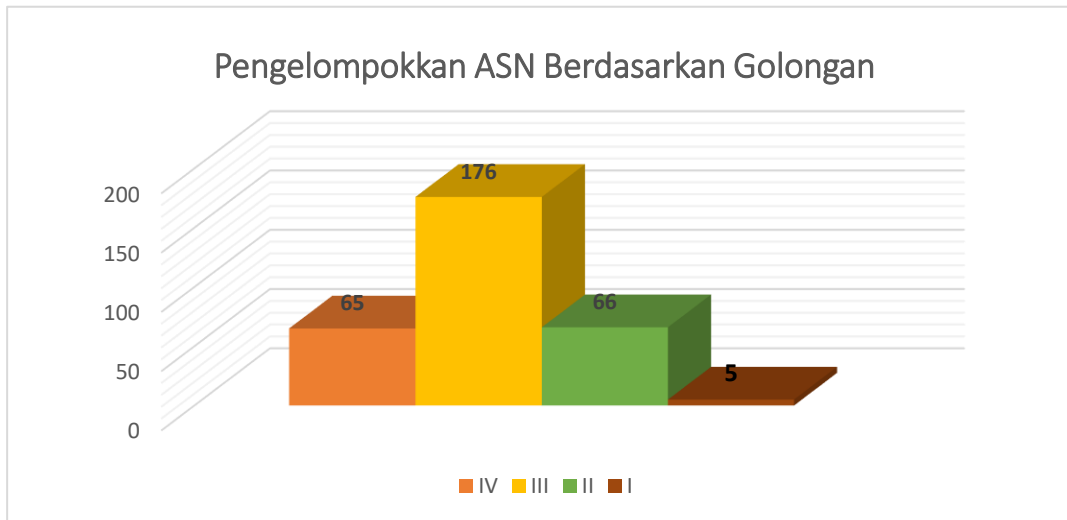
laki-laki dan pegawai perempuan sebanyak 205 (dua ratus lima) orang. Persentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pengelompokkan PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



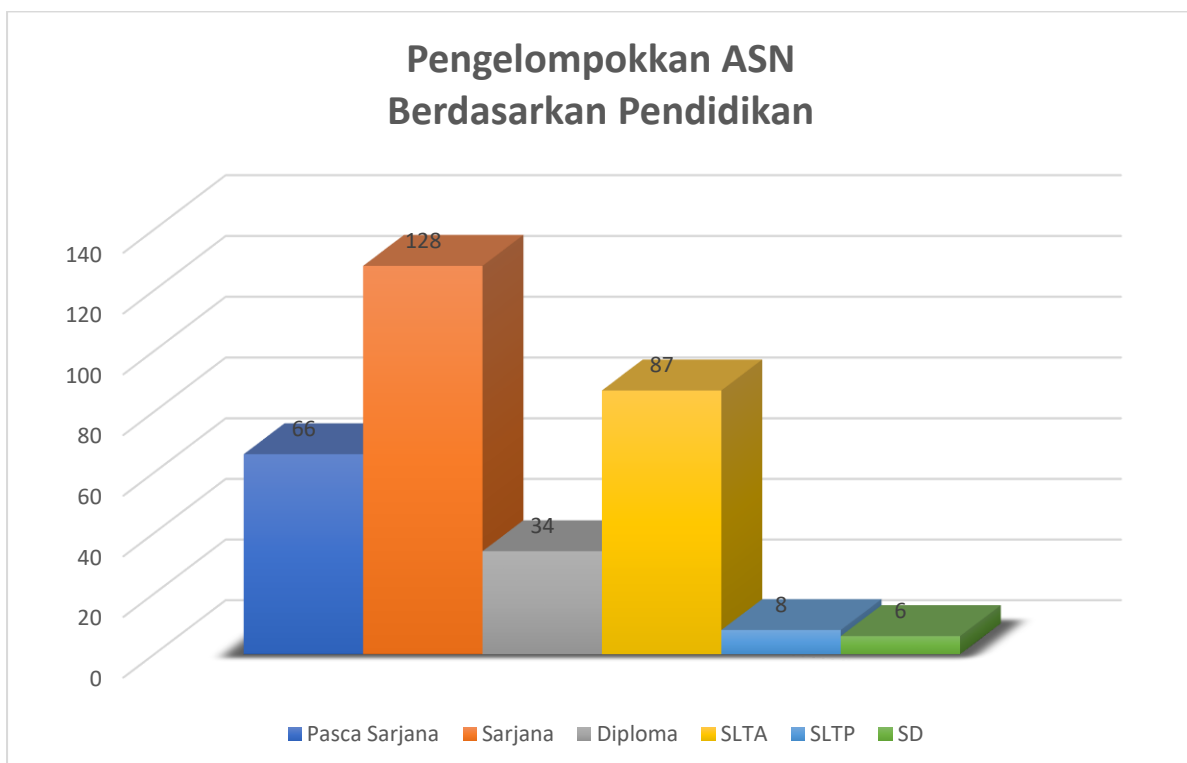
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokkan pegawai berdasarkan golongan:

Grafik 1.2
Pengelompokkan PNS Berdasarkan Golongan



Per 31 Desember 2024, Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2/S3). Pengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini:

Grafik 1.3
Pengelompokkan PNS Berdasarkan Pendidikan



F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Selain fungsi tersebut, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang menangani urusan di bidang kerjasama dan penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani urusan pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa serta LPSE, Biro Kesejahteraan Rakyat yang menangani pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan dalam Biro Kesejahteraan Rakyat yang belum sesuai dengan jadwal Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan beberapa memiliki konsep pertemuan yang masih belum mengacu pada tupoksi sehingga *output* kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;
2. Masih Terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan indikator kinerja kunci dan pemahaman definisi operasional antara Tim Penyusun LPPD, Tim Reviu LPPD, dan Tim Evaluasi LPPD;
3. Penanganan perkara yang kurang optimal serta pembahasan Ranperda yang terhambat dikarenakan ada Perangkat Daerah yang kurang proaktif dalam proses pembahasan;
4. Belum optimalnya Sinkronisasi Program/Kegiatan terkait dalam penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian.

5. Keterbatasan kewenangan Biro Perekonomian selaku pembina BUMD.
6. Rendahnya kepatuhan dan disiplin SKPD dalam sinkronisasi jadwal penginputan RUP secara tepat waktu;
7. Belum optimalnya administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaporan pelaksanaan pembangunan, dan kualitas data administrasi pembangunan;
8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP belum optimal. Belum seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat secara menyeluruh dan tepat waktu, sehingga perbaikan berkelanjutan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan nilai SAKIP;
9. kurang adaptifnya pelaksana terhadap aturan SKM dan FKP.

H. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	3.370	m2	
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)	
		2.048	m2	
3	Listrik	3	Jaringan	
4	Air	3	Jaringan	
5	Telepon	118	Line	1 internet, telepon dan fax
6	Area Parkir	3	Area	
7	Ruang Rapat	16	Ruang	
8	Ruang Arsip	1	Ruang	
9	Koperasi	1	Unit	
10	Taman Dalam	2	Area	

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Komputer	515	Unit	
12	Printer	489	Unit	
13	Meja	958	Unit	

Sumber: data Biro Umum Setda Prov. Kaltim

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

TUJUAN/SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
				2024	2025	2026	
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	50	55	60	Sekretariat Daerah
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	2	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	Nilai	BB	BB	BB	
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	Indeks	85	85,5	86	
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Kesra
	2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro POD
	3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%	100%	100%	
	4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100%	100%	100%	
	5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100%	100%	100%	Biro Hukum
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

TUJUAN/SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
				2024	2025	2026	
penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		90%	95%	100%	
	3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	71	73	76	Biro PBJ
	4	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	90%	91%	92%	Biro Adbang
Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	70%	80%	100%	Biro Organisasi
	2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	85	85,5	86	Biro Umum
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	70	71	72	Biro Adpim
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	85,5	86	

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK <i>(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar	Biro Kesra
		2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Biro POD
		3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi			Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Fasilitasi Bantuan Hukum	Biro Hukum
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Perekonomian
		2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
		3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ
		4	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Adbang
	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA
	administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Umum
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
						Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				
			Fasilitasi Keprotokolan				

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana, untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat penjelasannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	$\left(\frac{\text{Kebijakan bidang kesra yang difasilitasi}}{\text{Usulan fasilitasi bahan kebijakan bidang kesra}} \right) \times 100\%$	Laporan seluruh bagian di Biro Kesra	Biro Kesejahteraan Rakyat
	2. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terlapor}}{\text{Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah}} \right) \times 100\%$	LPPD, LKPJ, RLPPD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	3. Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan otda yang disahkan}}{\text{Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan otda yang dirumuskan}} \right) \times 100\%$	Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PENLOK, PENDELEGASIAN PENGADAAN TANAH, DAN KEROHIMAN/SANTUNAN (DPSK), (Pergantian Antar Waktu (PAW), Camat Berprestasi)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4. Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah usulan kerja sama daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan kerja sama}} \right) \times 100\%$	Usulan Kerja Sama Daerah dari Perangkat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	5. Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum diharmonisasi}}{\text{Total produk hukum yang akan dibuat}} \right) \times 100\%$	Produk Hukum	Biro Hukum
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	6. Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	$\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}} \right) \times 100\%$	Laporan hasil realisasi koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian	Biro Perekonomian
	7. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah Nominal yang disetorkan menjadi PAD}}{\text{Jumlah Nominal Target}} \right) \times 100\%$	Laporan setoran dari masing-masing BUMD	Biro Perekonomian
	8. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	Hasil Evaluasi LKPP	LKPP	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULA PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	9. Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	$\frac{(\text{Total Capaian Realisasi Fisik OPD})}{(\text{Nilai APBD})} \times 100\%$	Hasil Evaluasi SIRA (Radalo)	Biro Administrasi Pembangunan
Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK	10. Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	$\frac{(\text{Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB})}{(\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang dinilai SAKIPnya})} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	Biro Organisasi
	11. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	Perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017	IKM	Biro Umum
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	12. Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Penilaian (LHP) oleh Inspektorat Prov. Kaltim	Biro Administrasi Pimpinan
	13. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017	IKM	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Setda Prov. Kaltim dan dalam pelaporan kinerja. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	60,00
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	70,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
dan memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	86,00
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100,00
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00
		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100,00
		Persentase Kerja Sama Daerah Yang difasilitasi		100,00
		Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100,00
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		95,00
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	73
		Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	91,00
	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	80,00
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	85,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,5

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Setda Prov. Kaltim Tahun 2025

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp862.829.334.913 dengan rincian Belanja Operasi Rp805.153.905.415 dan Belanja Modal Rp57.675.429.498

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	457.153.492.667,00	373.812.473.292,00	81,77%	
1.1	Program Kesejahteraan Rakyat	442.222.171.874,00	359.357.696.541,00	81,26%	Biro Kesra
1.2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	11.571.495.849,00	11.503.713.578,00	99,41%	Biro POD
1.3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.359.824.944,00	2.951.063.173,00	87,83%	Biro Hukum
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	23.372.793.525,00	13.768.614.037,00	58,91%	
2.1	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.724.885.027,00	2.643.304.248,00	97,01%	Biro Ekonomi
2.2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.160.822.403,00	4.544.296.740,00	88,05%	Biro PBJ
2.3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	15.487.086.095,00	6.581.013.049,00	42,49%	Biro Adbang
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	346.521.745.760,00	296.141.296.868,93	85,46%	
3.1	Program Penataan Organisasi	3.864.642.295,00	1.898.957.568,00	49,14%	Biro Organisasi
3.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	342.657.103.465,00	294.242.339.300,93	85,87%	Biro Umum
	Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	24.488.515.538,00	24.301.776.387,00	99,24%	
4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.488.515.538,00	24.301.776.387,00	99,24%	Biro Adpim

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

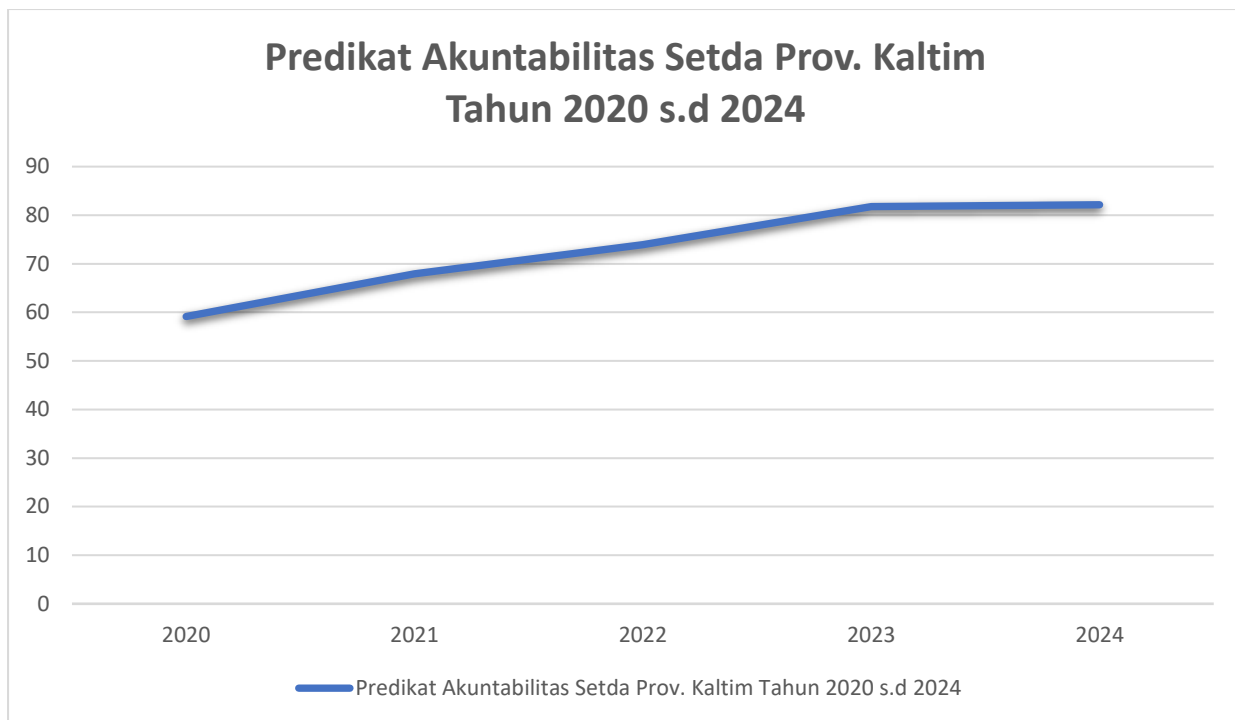
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024

No	Komponen Penilaian	Nilai Tahun					Peningkatan/ Penurunan Capaian 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	20.39	23.75	22.20	30.00	30.00	0.00
2	Pengukuran Kinerja	13.75	15.00	14.80	15.40	21.30	5.90
3	Pelaporan Kinerja	9.88	11.22	7.70	8.00	11.85	3.85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3.84	6.85	14.00	14.80	19.00	4.20
5	Capaian Kinerja	11.28	11.12	15.20	13.60		-
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		59.14	67.93	73.90	81.80	82.15	0.35
Kategori Penilaian		CC	B	BB	A	A	

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim



2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat penjelasannya pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/ Belum
1.	Perencanaan Kinerja: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki dokumen perencanaan mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026	Perencanaan Kinerja: Meskipun hasil evaluasi SAKIP Setda mendapatkan nilai optimal dari Bobot 30, namun Setda Prov Kaltim senantiasa berkomitmen terhadap peningkatan terhadap komponen perencanaan. Penyusunan Renstra 2025-2029, Setda Prov Kaltim fokus pada peningkatan indikator SMART pada IKU, perbaikan Cascading logical framework, dan lain sebagainya.	Sudah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/ Belum
2.	Pengukuran Kinerja: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi melalui aplikasi E-SAKIP. Hal ini untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bagi pimpinan Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya penyajian kinerja pada aplikasi E-SAKIP dalam mengukur kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja yang lebih baik dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Rekomendasi: Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilengkapi permasalahan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja berikutnya agar dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya dan hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai dasar acuan dalam penyesuaian	Pengukuran Kinerja: • Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi E-SAKIP sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan strategi kinerja, dengan mengandalkan monev renaksi TW I, TW II, TW III dan TW IV secara rutin. • Melakukan evaluasi triwulanan atas capaian indikator dan realisasi anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program. • Dengan Monev Renaksi ini dapat disisir Kegiatan/Sub Kegiatan yang perlu dilakukan efisiensi anggaran.	Sudah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	strategi/langkah-langkah dalam mencapai kinerja. Di samping itu, memastikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sampai level sub kegiatan.		
3.	Pelaporan Kinerja: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024, yang di formalkan, direviu, dipublikasikan serta disampaikan tepat waktu. Di samping itu, laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Serta telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya kepedulian seluruh pegawai dalam penyajian informasi kinerja pada E-SAKIP belum optimal.	Pelaporan Kinerja: • Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam penginputan data kinerja pada E-SAKIP; • Menyusun reviu LKjIP secara berkala; • Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil LKjIP sebelumnya dalam bentuk rencana aksi; Membuat list setiap bulan sampai sejauh mana pengisian esakip, dan share keterisian pengisian esakip ke Grup Whatsapp Pimpinan. • Memanfaatkan hasil evaluasi LKjIP untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.	Sudah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	Rekomendasi: a) Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam penyajian informasi kinerja pada E-SAKIP; b) Menyusun secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu atas laporan kinerja (LKjIP) untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas; c) Memanfaatkan/menggunakan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) seperti permasalahan/hambatan/rekomendasi dijadikan dasar oleh pimpinan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi, penyesuaian perencanaan, mempengaruhi budaya kerja perbaikan dan tindak lanjut.		
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Memastikan setiap hasil evaluasi internal memuat	Sudah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian sasaran/program/kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh bidang/sub bidang/staf dan dilaksanakan secara berjenjang. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya belum terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan sasaran/program/kegiatan yang dievaluasi dan belum terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti. Rekomendasi: Agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan sasaran/program/kegiatan yang dievaluasi dan belum terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti.	kesimpulan keberhasilan/kegagalan sasaran, program, dan kegiatan; - Menyusun laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal dan memantau progresnya secara berkala. - Simpulan keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat pada uraian di bawah tabel. *)	

Menindaklanjuti rekomendasi pada aspek pengukuran kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi capaian kinerja. Setiap Biro diwajibkan melakukan input e-sakip

secara berkala, sehingga data kinerja dapat tersaji lebih cepat dan akurat. Selain itu, dilakukan evaluasi triwulanan terhadap capaian indikator dan realisasi anggaran guna memastikan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Dari hasil evaluasi tersebut, disusun laporan analisis kinerja yang memuat capaian, hambatan, serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis pimpinan. Dengan langkah ini, diharapkan data hasil pengukuran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian kinerja yang efektif.

Dalam aspek pelaporan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan serta penginputan data kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP. Setiap Biro telah menunjuk penanggung jawab (PIC) yang bertugas memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja.

Sekretariat Daerah juga telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara berkala dengan mendokumentasikan seluruh hasil reviu dalam bentuk laporan resmi yang memuat koreksi, saran perbaikan, serta tindak lanjut dari temuan sebelumnya. Hasil reviu tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan antara proses evaluasi dan perbaikan kinerja. Selain itu, setiap rekomendasi dari hasil LKjIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan disetujui oleh pimpinan. Upaya ini menunjukkan komitmen organisasi untuk memastikan laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar digunakan sebagai alat manajemen untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan evaluasi internal. Evaluasi tersebut menggunakan pedoman teknis yang telah disempurnakan agar mencakup kesimpulan atas keberhasilan maupun kegagalan dari setiap sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Setiap hasil evaluasi dituangkan dalam laporan resmi yang dilengkapi dengan tindak lanjut atas rekomendasi dan bukti

pelaksanaan perbaikan. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tindak lanjut, dibentuk tim pengendalian dan monitoring internal yang bertugas memantau progres penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi. Seluruh dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut diarsipkan secara sistematis sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi peningkatan kualitas manajemen kinerja di masa mendatang. Melalui langkah-langkah tersebut, Sekretariat Daerah berupaya memperkuat budaya akuntabilitas dan memastikan seluruh rekomendasi evaluasi benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan operasional.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan sasaran/program/kegiatan sebagai berikut: Hasil Pengukuran Kinerja 2024 (tabel 3.3 pada LKjIP) dapat dilihat bahwa dari 4 Sasaran Rentra Setda Provinsi Kalimantan Timur, capaian seluruh Indikator Sasaran sebanyak 13 indikator semua capaian 100 persen ke atas, atau 7 indikator sasaran realisasi capaian 100 persen, dan 6 indikator sasaran realisasi capaian lebih dari 100 persen. Namun, apabila dibandingkan realisasi kinerja dengan indikator sasaran yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat beberapa IKU yang menurun, yakni:

1. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang diharmonisasi dan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah Hukum dan HAM penurunan sebesar -1,56, hal ini dikarenakan pembahasan Raperda terhambat karena ada Perangkat Daerah kurang proaktif dalam proses pembahasan.
2. Persentase tingkat capaian realisasi Pembangunan menurun sebesar -1.48 kondisi ini disebabkan belum tertibnya administrasi pelaksanaan pembangunan.

Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP predikat minimal BB turun sebesar -16.67. Kondisi ini disebabkan perubahan komponen penilaian SAKIP yang tadinya 5 komponen menjadi 4 komponen serta belum optimalnya komitmen Pimpinan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	60,00	92,44	154,07%
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	70,00	78,74	112,49%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	86,00	87,89	102,20%
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100	100	100%
		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100	100	100%
		Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100	100	100%
		Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100	94,93	94,93%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100	100	100,00%
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		95	97,5	102,63%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	78	89,57	114,83%
		Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	91	93,09	102,30%
	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	80	78,38	97,98%
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	86	86,6	100,70%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat	71	82,15	115,70%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85.5	86,46	101,13%

Sumber: data Biro-biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim Tahun 2025 diolah

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. **Tujuan:** Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK. Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Kebijakan.

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	60,00	92,44	154,07
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	70,00	78,74	112,49
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	86,00	87,89	102,20

Sumber: data Sekretariat Daerah Prov. Kaltim tahun 2025 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5

Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 s.d. 2024 dengan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2025
			2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6-1)*100)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	-	-	55,75	92,44	65,81%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	-	-	-	78,74	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	-	-	-	87,89	-

Sumber: data Sekretariat Daerah Prov. Kaltim tahun 2025 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target tahun akhir Renstra

Tabel 3.6**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(6=5/4*100)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	60	92,44	154,07%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	100,00%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	86	87,89	102,20%

d. Analisis penjabaran data capaian

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Nilai IKK Instansi sebesar 92,44. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kebijakan yang disusun dan dilaksanakan berada pada kategori sangat baik, yang mencerminkan bahwa proses perumusan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik yang berkualitas.

NO	NAMA KEBIJAKAN	ANALIS INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI AKHIR IKK	NILAI IKK INSTANSI
1	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan perlindungan sosial bagi pekerja Penerima PU (PU) dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pemerintah Daerah memberikan iuran jaminan sosial bagi pekerja renten (BPU). Intervensi Pemerintah Daerah dalam melakukan coverage manfaat jaminan sosial untuk BPU, sedangkan untuk formil pemberian sosial bagi Penerima Upah sudah dilaksanakan melalui kegiatan jaminan sosial apda tahun 2024.	Arismanandar, S.STP, M.Si	98,125	PK: 84,375 K: 100 EK: 83,75 TP: 100 JF: 92	92	92.44 Nilai IKK Instansi
2	Beasiswa Tuntas - Beasiswa Tuntas dan Stimulan adalah kebijakan salah satu pemberian layanan pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan (beasiswa) kepada siswa (beasiswa Stimulan) dan Mahasiswa (beasiswa stimulan dan tuntas).	Siti Mariani, S.Pd	95	PK: 75 K: 100 EK: 91,25 TP: 100 JF: 92,375	92,375	
3	Program Prioritas Rumah Layak Huni - bahwa setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan perlu disinergikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur, sehingga perlu digagas kebijakan TJS, salah satunya Program Prioritas Rumah Layak Huni	I. Yulistuti Roudhotul Wahidah, ST, M.Si	100	PK: 100 K: 91,25 EK: 83,75 TP: 100 JF: 92,9375	92,9375	

Nilai IKK Instansi diperoleh dari tiga kebijakan yang menjadi objek penilaian, yaitu Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Beasiswa Tuntas, dan Program Prioritas Rumah Layak Huni. Masing-masing kebijakan memperoleh nilai akhir IKK sebesar 92,00, 92,375 dan

92,9375. Capaian tertinggi diperoleh oleh Program Prioritas Rumah Layak Huni, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki kualitas yang lebih optimal terutama pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, capaian Nilai IKK Instansi sebesar 92,44 menunjukkan keberhasilan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ke depan, peningkatan kualitas evaluasi dan penguatan pemanfaatan hasil evaluasi diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas kebijakan dan mempertahankan capaian IKK pada kategori sangat baik.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah



Nomor : B/414/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
3 September 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
di
Samarinda

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi kinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Menetapkan kinerja terkait tingkat implementasi SAKIP melalui Renstra seluruh Perangkat Daerah (PD);
- Melakukan reviu terhadap indikator kinerja tingkat Pemerintah Daerah (pmda) dan tingkat PD;
- Melakukan internalisasi pengisian data capaian kinerja melalui aplikasi E-SAKIP kepada seluruh PD;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada kegiatan rapat pimpinan; dan
- Pemberian reward dan punishment dari hasil evaluasi AKIP akan dilakukan melalui penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini masih berupa draft untuk proses penetapan lebih lanjut.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,74 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25.89	26.14
2. Pengukuran Kinerja	30	22.48	22.74
3. Pelaporan Kinerja	15	12.76	12.59
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.76	17.29
Nilai Hasil Evaluasi	100	77.89	78.74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai 78,74 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan sangat baik baik pada tingkat pemerintah daerah maupun sebagian besar perangkat daerah. Selain itu, telah mulai

terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja serta tersedianya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Capaian nilai tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain melalui penetapan kinerja implementasi SAKIP dalam dokumen Renstra perangkat daerah, pelaksanaan reviu indikator kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah, optimalisasi pengisian data capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Upaya-upaya tersebut telah mendorong peningkatan kualitas tata kelola kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada aspek Perencanaan Kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan adanya keselarasan kinerja dari tingkat pemerintah daerah hingga individu melalui penerapan penjenjangan kinerja dan pemetaan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang perlu menyempurnakan kualitas penjenjangan kinerja, indikator kinerja, serta kesesuaian target dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pada aspek Pengukuran Kinerja, pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi telah dilaksanakan secara berkala dan didukung oleh pedoman pengukuran yang berlaku di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Meskipun demikian, integrasi data pengukuran kinerja antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

Pada aspek Pelaporan Kinerja, laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah telah disusun dan dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, kualitas analisis dalam laporan masih perlu diperkuat, terutama terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya, perbandingan capaian dengan daerah lain (*benchmarking*), serta analisis faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja.

Sementara itu, pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah dan memiliki pedoman evaluasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Kendati demikian, tindak lanjut

hasil evaluasi internal serta pemanfaatannya sebagai instrumen peningkatan kinerja masih perlu dioptimalkan.

Secara keseluruhan, capaian nilai AKIP sebesar 78,74 (Predikat BB) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang kuat dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar nilai AKIP dapat meningkat menuju predikat yang lebih tinggi serta menghasilkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah



Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang baik. Hal ini terlihat dari mayoritas perangkat daerah dan unit pelayanan memperoleh nilai SKM pada kategori Baik (B) hingga Sangat Baik (A).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat, terutama pada aspek kompetensi petugas, kesesuaian produk layanan, perilaku

pelaksana, dan kemudahan memperoleh pelayanan. Selain itu, upaya digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil survei masih menunjukkan adanya beberapa unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian dan prioritas perbaikan. Unsur yang paling sering muncul sebagai prioritas perbaikan pada berbagai perangkat daerah antara lain waktu penyelesaian pelayanan, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur pelayanan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, didukung fasilitas yang lebih memadai, serta mekanisme pelayanan dan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif dan responsif.

Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah telah menyusun berbagai rencana perbaikan, antara lain melalui optimalisasi layanan berbasis digital, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyempurnaan standar operasional prosedur pelayanan, penguatan sistem pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik dan memperoleh apresiasi positif dari masyarakat. Namun demikian, perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar kualitas pelayanan semakin meningkat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

Faktor pendukung:

1. Indeks Kualitas Kebijakan

- Adanya pendampingan KDOD LAN RI;
- Aktifnya JF AK sebagai pengisi profil yang menambah angka penilaian;

- Dukungan seluruh perangkat daerah terutama Balitbangda, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pimpinan;
 - Adanya aturan baru perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang lebih mudah;
 - Adanya grup WhatsApp Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang aktif sebagai ajang diskusi pimpinan dan JF yang terlibat;
 - Telah terselenggaranya *Kick Off* Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Pusat;
 - Dipilihnya 3 (tiga) kebijakan yang akan dinilai;
 - Telah dianggarkannya pendampingan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) oleh LAN RI.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- Penerapan nilai SAKIP di Pemerintah Prov Kaltim, komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan. Salah satu bentuk konkret ini melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja yang berbasis kinerja yang saat ini masih berproses.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah
- Sebagian besar Perangkat Daerah telah melakukan Penetapan Standar Pelayanan;
 - Adanya dukungan, perhatian, dan komitmen kuat dari pimpinan unit layanan untuk menjadikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar perbaikan dengan sebagian besar telah menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- f. Permasalahan
1. Indeks Kualitas Kebijakan
- Kontribusi JF tidak mendapatkan timbal balik terhadap Angka kredit mereka;
 - Belum banyaknya *Policy Brief* mengenai IKK;
 - Belum terdokumentasinya evidence dalam tahapan pengisian penilaian IKK, terutama aturan dan kebijakan tersebut belum diuji publik.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- Rendahnya pemahaman terhadap konsep SAKIP yaitu masih adanya ASN yang belum memahami keterkaitan antara Perencanaan - Penganggaran - Pelaporan. SAKIP dianggap hanya sebagai kewajiban administratif, bukan alat manajemen kinerja.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah

Hasil SKM hanya menjadi laporan administratif dan tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan.

g. Solusi dan Upaya

1. Indeks Kualitas Kebijakan

- Mengusulkan kepada LAN sebagai pengampu IKK agar kinerja mereka diberikan apresiasi;
- Mengarahkan arahan kepada JFAK agar membuat Policy Brief tentang IKK;
- Mendokumentasikan penerapan kebijakan sebagai *evidence* penilaian IKK.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Memastikan sasaran dan indikator dalam RPJMD/RKPD selaras dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan berorientasi hasil.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah

Peningkatan Kompetensi Pelaksana: Mengadakan pelatihan berkelanjutan (*in-house training, coaching, mentoring*) bagi petugas layanan, terutama mengenai *service excellence* dan etika pelayanan.

2. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.7

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
3.	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100,00	94.93	94,93

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8

Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 s.d. 2024 dengan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2025
			2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6-1)*100)
1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0
2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	-	-	100,00	100,00	0
3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Persen	-	-	100,00	100,00	0
4	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	Persen	90,00	95,00	100,00	100,00	0
5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	102,00	101,59	100,00	94.93	-5.07

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100,00	94.93	94.93

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi

Sesuai definisi operasional penghitungan indikator ini adalah:

$$\text{Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi} = \frac{\left(\frac{\text{Kebijakan bidang kesra yang difasilitasi}}{\text{Usulan fasilitasi bahan kebijakan bidang kesra}} \right) \times 100\%}{}$$

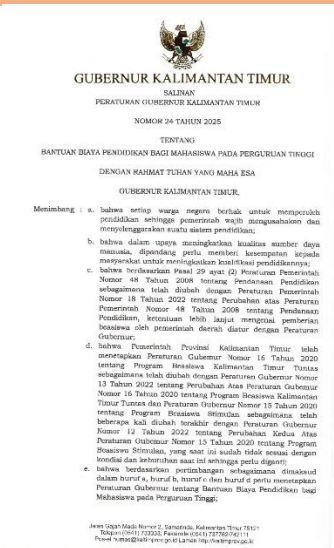
Adapun penjelasan dari Kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan daerah dan berdasarkan hasil analisis ataupun amanah dalam peraturan

tersebut yang mengharuskan daerah membuat kebijakan turunan, contohnya Peraturan Presiden tentang Stunting, yang diturunkan menjadi Peraturan Gubernur dan lain sebagainya. Sedangkan Kebijakan daerah yang diangkat daerah karena menjadi permasalahan daerah atau merupakan kebijakan yang merupakan amanat kepala daerah. Untuk indikator ini capaian kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat cukup tinggi yaitu **100%**. Tingginya capaian ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

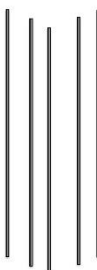
- Seluruh kegiatan yang direncanakan atau disusun yang meliputi 11 sektor yang menjadi lingkup koordinasi Biro Kesra, semua kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev terselenggara/terlaksana.

Adapun 11 (sebelas) sektor yang dimaksud meliputi:

**Tabel Data (Output) Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan
Sektor/Perangkat Daerah terkait Tahun 2025**

No	Sektor	Output
1	Sektor Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim)	

No	Sektor	Output
2	Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan Prov. Kaltim)	KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI PENYELANGSARAN KABUPATEN / KOTA SEHAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 SEPTEMBER 2025 Pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat Se-Kalimantan Timur. Setelah mendengarkan hasil persiapan dari Tim Pembina KKS Provinsi Kalimantan Timur dan diskusi dengan peserta Rakor, hasil kesepakatan diuraikan sebagai berikut: 1. Kombinasi pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas masyarakat. 2. Screening untuk penanggulangan malaria dan obat tetes mata bagi anak sekolah dengan metode ASSIST. 3. Mendukung implementasi Pesar Baru-GNI di daerah. 4. Melaksanakan Bimbingan Teknis secara daring dengan menghadirkan Kementerian sebagai nara sumber. 5. Tim Pembina KKS Provinsi akan menyampaikan Instruksi Gubernur untuk penyelenggaraan KKS di 10 kabupaten/kota dan surat edaran terkait kesepakatan Rakor KKS. Demikian kesepakatan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3	Sektor Sosial (Dinas Sosial Prov. Kaltim)	BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RAPAT KOORDINASI PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Balikpapan, 29 Oktober 2023 Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Hotel Golden Tulip Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Tujuh, Kelurahan Klandasan Bir Kota Balikpapan, pada kegiatan "Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur", maka dengan ini berkesimpulan, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut: 1. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur akan berkoordinasi ke BAPPENAS dalam rangka perolehan data kemiskinan dari Dasi 1 sampai 5 serta berkonsultasi dengan BAPPENAS, Kemensos dan BPS untuk menyamakan persepsi dalam pengelompokan, penetapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data yang belum mendapatkan pemertugan dan data yang not aknt. 2. Hasil dari konsultasi tersebut akan disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Rappeda Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BPS Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan Ground Chocling di lapangan berdasarkan hasil konsultasi tersebut. 3. Tahun 2026 masing-masing Kabupaten/Kota melaksanakan anggaran untuk verifikasi dan validasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi pendanaan kegiatan verifikasi dan validasi DTSEN melalui Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat afirmasi. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan. Balikpapan, 29 Oktober 2023 Pimpinan Rapat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,  Dr. Dalimah, S.Pd, M.P. Pembina Utama Muda NIP. 19601110199032003
4	Sektor Pemuda dan Olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim)	BERITA ACARA REKOMENDASI, KOMITMEN DAN KESEPAKATAN BERSAMA RAPAT KOORDINASI PENYIAPAN BAHAN KEBELAJAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Pada hari ini Kamis tanggal Enam November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Hotel Blue Sky Balikpapan, Jl. Lelend Suprapto No. 1, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, 76131 pada kegiatan, RAPAT KOORDINASI PENYIAPAN BAHAN KEBELAJAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, maka dengan ini merekomendasikan, berkesimpulan, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut: A. REKOMENDASI I. Domain Pendidikan dan Pelatihan 1. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda. 2. Pemerintah daerah perlu memperlurus akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan; 3. Meningkatkan pelatihan vokasi, digital skill, dan literasi keuangan bagi pemuda; 4. Mempertukar kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis keterampilan kerja. II. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan 1. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda. 2. Optimalisasi program layanan kesehatan remaja dan pemuda, termasuk kesehatan mental dan reproduksi; 3. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan gizi, olahraga, dan gaya hidup sehat bagi pemuda;

No	Sektor	Output
5	Sektor Pariwisata (Dinas Pariwisata Prov. Kaltim)	BERITA ACARA REKOMENDASI, KOMITMEN DAN KESEPAKATAN BERSAMA RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN BIDANG KEOLAHRAGAAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Hotel Blue Sky Balikpapan, Jl. Letjend Suprapto No. 1, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, 76131 pada kegiatan: RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN BIDANG KEOLAHRAGAAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, maka dengan ini merekomendasikan, berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut: A. REKOMENDASI 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun kebijakan daerah yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi dan olahraga komunitas. 2. Perlu adanya sinergi lintas sektor antara Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perangkat daerah lainnya dalam pembudayaan olahraga di Masyarakat. 3. Perlu pembudayaan Olahraga di lingkungan Sekolah dari Usia Dini, sesuai dengan bakat dan keterampilan masing-masing. 4. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang mudah diakses, merata, dan inklusif di setiap wilayah. 5. Mendorong pembentukan dan penguatan komunitas olahraga masyarakat di tingkat kelurahan, desa, dan sekolah untuk meningkatkan minat dan kebiasaan berolahraga. 6. Menetapkan agenda olahraga masyarakat tahunan tingkat daerah sebagai bentuk implementasi nyata budaya berolahraga di Kalimantan Timur.  LAPORAN KEGIATAN RAPAT FASILITASI PEMBAHASAN PROGRES USULAN DAN PROSES PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN PEMAJUAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.  BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sektor	Output
----	--------	--------

- 6
- Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333, Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kalimprov.go.id, Laman

NOTULA KEGIATAN

Kegiatan : 1. Pembahasan Kategori Miskin/Miskin Ekstrem
2. Pembahasan Pengampu Pelaksana Anggaran Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan TA 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Pelaksana Kegiatan : Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat, Lt.IV Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jl. Gajah Mada, No.02, Kota Samarinda

Waktu Kegiatan : Pukul 09.00 Wita s.d selesai

Ketua Tim Kerja : Inna Wahdini (Pengadministrasi Perkantoran Biro Kesra Setda Prov. Kaltim)

Peserta Kegiatan : Daftar Hadir (Terlampir)

Hasil Rapat :

Kesimpulan Rapat :

- Rapat dipimpin Oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan di hadir sesuai daftar terlampir;
- Rapat dihadiri oleh Instansi dan Lembaga yang terkait;
- Pembahasan dalam pertemuan hari ini merupakan finalisasi untuk penetapan klasifikasi Pekerja Rentan yang bersumber dari :
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HJK/2022
 - Badan Pusat Statistik
 - Kemendagri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
- Pertemuan Rapat pada hari ini membahas dan menyusun kembali Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Klasifikasi Pekerja Rentan yang masuk kategori miskin/miskin Ekstrem bersama tim antar perangkat daerah membahas rancangan Peraturan gubernur yaitu:

Pasal 1

Kriteria pekerja rentan meliputi :

- berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun berjalan;
- kondisi kerja dibawah standar;

- 7
- Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan MT. Haryono No. 96/IV A, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123
Pos-el: dpmpr@kalimprov.go.id, Laman: https://dpmpr.kalimprov.go.id/
Call Center +628122277448

Samarinda, 3 September 2025

Nomor : 400.10.3.4/514/PDKP
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : Surat Pengantar Keputusan Gubernur Kaltim

Yth. (Daftar Terlampir)
Di Tempat

Berdasarkan Permendes No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dalam arahnya agar membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Tingkat Provinsi. Berkenaan hal tersebut berikut kami sampaikan Salinan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.266/2025 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur. (SK Gubernur Terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Pemimpin Utama Muda (P/Us)
NIP. 197908101998021001

No	Sektor	Output
8	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim)	 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Yth. Bupati / Walikota se-Kalimantan Timur SURAT EDARAN NOMOR : 500.15.12/1366/B.KESRA-1/2025 TENTANG LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH OLEH PEMBERI KERJA Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M549K.04.00/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pihak pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan Ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. 2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. 3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan Ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. 4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibayar oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis; b. Pemberi kerja wajib menjamin keamanan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekteja apabila Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Samarinda, 4 Juni 2025 Wakil Gubernur Kalimantan Timur,  Seno Aji Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333 Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el: humas@kaltimprov.go.id, Laman: http://kaltimprov.go.id Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Base Sertifikasi Elektronik (SDSE). Badan Siber dan Sandi Negara  PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333 Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el: humas@kaltimprov.go.id, Laman: http://kaltimprov.go.id KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 500.14/1184/Diakominfo-IV/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR PRODUKSI SATU DATA KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data, tugas Produksi Satu Data menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data beserta metadata kepada walisdata; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Operator Produksi Satu Data Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3646); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48446); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Base Sertifikasi Elektronik (SDSE). Badan Siber dan Sandi Negara
9	Sektor Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim)	

No	Sektor	Output
10	Sektor Perhubungan (Dinas Perhubungan Prov. Kaltim)	 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2025 – 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kalimprov.go.id Lembar http://kalimprov.go.id BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RAPAT KOORDINASI BIDANG LEMBAGA DAN KEAGAMAAN SE-KALIMANTAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 Swissotel Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jum'at 31 Oktober 2025 Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Meeting Sumatera Swissotel Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jalan Lot No.1.Co.20, Bumi Harapan, Sepaku, Penajam North Paser Regency, East Kalimantan 76147, pada kegiatan "RAPAT KOORDINASI BIDANG KELEMBAGAAN SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025", maka dengan ini Peserta (daftar hadir terlampir) berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut : 1. Biro Kesra akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pesantren di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang melibatkan unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pimpinan Pondok Pesantren, TNI/Polri (Bhabinkamtibmas/Babinsa), dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berfokus pada pencegahan, penanganan cepat, dan mitigasi risiko terkait keamanan fisik, sosial, dan psikologis santri/tenaga pendidik. 2. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur mendorong pihak pondok pesantren untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan mengalokasikan anggaran dan program pelatihan rutin bagi pengurus pesantren serta mendorong implementasi sistem pengawasan internal (CCTV/Patrol Keamanan) di lingkungan pondok pesantren. 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya melakukan review/audit terhadap keberadaan pondok pesantren, baik yang sudah ada izin maupun yang belum ada izin se- Kalimantan Timur. 4. Memperkuat komitmen implementasi regulasi terkait pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan terutama di pesantren diantaranya :
11	Sektor Keagamaan (Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim)	

Sumber: data Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD).

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi

Kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi meliputi penetapan Lokasi, pendelegasian pengadaan tanah dan kerohiman/santunan, Pergantian Antar Waktu (PAW), serta Camat Berprestasi.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi

Kerja sama daerah yang difasilitasi meliputi fasilitasi kerjasama daerah antar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan kerja sama.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM

Biro Hukum Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 94,93%, hal tersebut terlihat dari rekapitulasi kinerja Tahun 2025 di bawah ini:

- Peraturan Gubernur sebanyak 53 dokumen;
- Peraturan Daerah Provinsi sebanyak 7 dokumen;
- Surat Keputusan sebanyak 519 Dokumen;
- Pendokumentasian Produk Hukum Daerah sebanyak 579 dokumen;
- Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi 394 dokumen;

**TABEL DATA (OUTPUT) BIRO HUKUM
SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN
TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2025**

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
1	1 Tahun 2025	1	02-Jan-25	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK	BAPENDA

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
				KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN BERMOTOR DAN OPSEN BEA CUKAI BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.	
2	2 Tahun 2025	2	20-Jan-25	DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025	BAPENDA
3	3 Tahun 2025	3	22-Jan-25	FASILITASI PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN PEMERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT	BIRO ADBANG
4	4 Tahun 2025	4	22-Jan-25	POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BIRO ORTAL
5	5 Tahun 2025	5	23-Jan-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON	DLH
6	6 Tahun 2025	6	23-Jan-25	TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM RANGKA KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DLH
7	7 Tahun 2025	7	24-Jan-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PUPR
8	8 Tahun 2025	8	24-Jan-25	PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BIRO ORGANISASI
9	9 Tahun 2025	9	17-Feb-25	PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM	PUPR

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
10	10 Tahun 2025	10	20-Feb-25	TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR	DINAS KEHUTANAN
11	11 Tahun 2025	11	12-Feb-25	TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BERSAMA	DISDIK
12	12 Tahun 2025	12	19-Feb-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH	INSPEKTORAT
13	13 Tahun 2025	13	04-Mar-25	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMNATAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPSTP
14	14 Tahun 2025	14	17-Mar-25	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	BPKAD
15	15 Tahun 2025	15	19-Mar-25	PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH	DISDIK
16	16 Tahun 2025	16	19-Mar-25	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	BIRO UMUM
17	17 Tahun 2025	17	19-Mar-25	PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI PARTICITING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)	BIRO EKONOMI

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
				PADA WILAYAH KERTJA MINYAK DAN GAS BUMI	
18	18 TAHUN 2025	18	19-Mar-25	PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN	DINAS PUPR
19	19 TAHUN 2025	19	25-Apr-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
20	20 TAHUN 2025	20	15-Mei-25	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
21	21 TAHUN 2025	21	26-Mei-25	PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPENDA
22	22 TAHUN 2025	22	26-Mei-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOPENTENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BIRO ORGANISASI
23	BERITA DAERAH	23	2025	TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	DPRD
24	23 TAHUN 2025	24	26-Mei-25	PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
25	24 TAHUN 2025	25	16-Juni-2025	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI	BIRO KESRA
26	25 TAHUN 2025	26	19 Juni 2025	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN	DINKES
27	BERITA DAERAH	27	2025	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN	DPRD
28	BERITA DAERAH	23	2025	TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	DPRD
29	26 TAHUN 2025	29	24-Jun-25	PENDIRIAN DAN REVITALISASI SEKOLAH UNGGULAN	DISDIK
30	27 TAHUN 2025	30	24 Juni 2025	FASILITASI PEMBERIAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	DINAS PUPR
31	28 TAHUN 2025	31	24 Juni 2025	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
32	29 TAHUN 2025	32	30 Juni 2025	PENUGASAN KEPADA PT. KALIMANTAN TIMUR MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN WISMA ATLET	DISPORA
33	30 TAHUN 2025	33	01 Juli 2025	PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BALIKPAPAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANAH GROGOT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALTIM	BAPENDA
34	31 TAHUN 2025	34	01 Juli 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN	DINAS PUPR

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
35	32 TAHUN 2025	35	10 Juli 2025	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN	BAPENDA
36	33 TAHUN 2025	36	10 Juli 2025	PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAERAH DAN/ATAU SANKSINYA	BAPENDA
37	34 TAHUN 2025	37	10 Juli 2025	GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	DISDIK
38	35 TAHUN 2025	38	18 Juli 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN	BAPENDA
39	36 TAHUN 2025	39	18 Juli 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALTIM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024	BAPENDA
40	37 TAHUN 2025	40	18 Juli 2025	FASILITASI PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	DISPERINDAGKOP
41	38 TAHUN 2025	41	25 Juli 2025	PENGEMBANGAN DESA WISATA	DINAS PARIWISATA
42	39 TAHUN 2025	42	12 Agustus 2025	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026	BAPENDA
43	40 TAHUN 2025	43	14 Agustus 2025	PENETAPAN KLASIFIKASI PEKERJA RENTAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM YANG MENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	BIRO KESRA
44	41 TAHUN 2025	44	21 Agustus 2025	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU	DISPRINDAGKOP
45	42 TAHUN 2025	45	21 Agustus 2025	STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD
46	43 TAHUN 2025	46	04-Sep-25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR	BAPPEDA

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
				26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTANTIMUR	
47	44 TAHUN 2025	47	12-Sep-25	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA
48	45 TAHUN 2025	48	15-Sep-25	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	BAPPEDA
49	46 TAHUN 2025	49	30-Sep-25	PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI	DISHUB
50	47 TAHUN 2025	50	30-Sep-25	DOKUMEN KAJIAN RESIOKO BENCANA (KRB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2026	BPBD
51	48 TAHUN 2025	51	02 Oktober 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PUPR
52	49 TAHUN 2025	52	02 Oktober 2025	RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2025-2029	BIRO KESRA
53	50 TAHUN 2025	53	02 Oktober 2025	TATA CARA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	DISBUN
54	51 TAHUN 2025	54	02 Oktober 2025	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	JDIH / PPUP
55	52 TAHUN 2025	55	05-Nov-25	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
56	53 TAHUN 2025	56	05-Nov-25	PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD

NO	PERATURAN GUBERNUR			TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	NO BD	TANGGAL		
57	54 TAHUN 2025	57	07-Nov-25	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
58	55 TAHUN 2025	58	01 Desember 2025	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BIRO ORGANISASI
59	56 TAHUN 2025	59	01 Desember 2025	DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH TAHUN 2024	BAPENDA
60	57 TAHUN 2025	60	02 Desember 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD

Sumber: data Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.

TABEL DATA (OUTPUT) BIRO HUKUM
SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2025

NO	KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR			
1	100.3.3.1/K.1/2025	06 Januari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-68 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BPOD
14	100.3.3.1/K.14/2025	22 Januari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.14/2025 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA PERIODE 2025-2029	BIRO EKONOMI
27	100.3.3.1/K.27/2025	11 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.27/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	KESBANGPOL
40	100.3.3.1/K.40/2025	19 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.40/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BIRO KESRA
53	100.3.3.1/K.53/2025	19 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.53/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMESARIS NON INDEPENDEN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2026	BIRO PEREKONOMIAN
66	100.3.3.1/K.66/2025	14 Maret 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.66/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS LAYANAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2030	DPMPD
79	100.3.3.1/K.79/2025	19 Maret 2025	KEPUTUSAN GUEBRNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.79/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL GENERASI EMAS	B.KESRA
92	100.3.3.1/K.91/2025	22-Apr-25	KEPUTUSAN GUEBRNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.91/2025 TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KERUMAH TANGGAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	BIRO UMUM
105	100.3.3.1/K.104/2025	19 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.104/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMAA HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA WARGA MASYARAKAT PERUMAHAN GRIYA TEPIAAN LESTARI (CARPOTEK) KECAMATAN SUNGAI	BPKAD

NO	KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR			
			KUNJANG KOTA SAMARINDA TAHAP XII	
118	100.3.3.1/K.117/2025	19 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.117/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG GRATIS BIAYA ADMINISTRASI PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PUPERA
131	100.3.3.1/K.130/2025	28 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.130/2025 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGLUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPENDA
144	100.3.3.1/K.143/2025	28 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.143/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN 2025	RSUD WAHAB
157	100.3.3.1/K.156/2025	24 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.156/2025 TENTANG HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2044	BINWAS
170	100.3.3.1/K.169/2025	24 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.169/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DPMPD
183	100.3.3.1/K.182/2025	24 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.182/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN JURNAL RISET PEMBANGUNAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BALITBANGDA
196	100.3.3.1/K.195/2025	22 Juli 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.195/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA DAN SEKRETARIAT SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2025	BANKUM
209	100.3.3.1/K.208/2025	23 Juli 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.208/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DISDIKBUD

NO	KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR			
222	100.3.3.1/K.221/2025	11 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.221 /2025 TENTANG PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) TANPA LELANG BARANG MILIK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BPKAD
235	100.3.3.1/K.235/2025	19 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.235/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENDAPATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPENDA
248	100.3.3.1/K.248/2025	19 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.248/2025 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
261	100.3.3.1/K.261/2025	25 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.261/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENINDAKAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF	DINAS PETERNAKAN
274	100.3.3.1/K.274/2025	04-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.274/2025 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DINAS ESDM
287	100.3.3.1/K.287/2025	22-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.287/2025 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DISDIK
300	100.3.3.1/K.300/2025	22-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.300/2025 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KUTAI BARAT SEBAGAI TUAN RUMAH GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA KE-XII TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026	DPMPD
313	100.3.3.1/K.313/2025	23-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.313/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI CAMAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BIRO POD
326	100.3.3.1/K.326/2025	24-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.326/2025 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PERSON IN CHARGE DAN BACK UP PERSON IN CHARGE DATA DAN INFORMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	PERIKANAN
339	100.3.3.1/K.339/2025	01 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.339/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPATUHAN ATAS HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPENDA
352	100.3.3.1/K.352/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.352/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RISET PENERAPAN	BALITBANGDA

NO	KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR			
			MODEL KOLABORASI USAHA BADAN MILIK DESA DAN INDUSTRI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
365	100.3.3.1/K.365/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.365/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2026	DP3A
378	100.3.3.1/K.378/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.378/2025 TENTANG PEMEBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA PERANGKATA DAERAH TERKAIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KAB/KOTA SE-KALIMANTAN TAHUN 2025	BANKUM
391	100.3.3.1/K.391/2025	11-Nov-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.391/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TOKOH BERJASA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BIRO KESRA
404	100.3.3.1/K.404/2025	01 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.404/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA KELOMPOK TANI PEDULI API PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DISBUN
417	100.3.3.1/K.417/2025	01 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.417/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029	BPBD
430	100.3.3.1/K.430/2025	01 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.430/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR	PPUK
443	100.3.3.1/K.443/2025	03 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.443/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BERUPA UANG UNTUK PERJALANAN RELIGI KEPADA PENJAGA RUMAH IBADAH SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	KESRA
456	100.3.3.1/K.457/2025	17 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.457/2025 TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA RT TELADAN KATEGORI DESA/KAMPUNG DAN KELURAHAN TINGKAT PROV. KALTIM TAHUN 2025	DISPEMDES

NO	KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR			
469	100.3.3.1/K.470/2025	17 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.470/2025 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH PANGAN POKOK TERTENTU SEBAGAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DINAS PANGAN
482	100.3.3.1/K.483/2025	23 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.483/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA KONVERSI LAHAN TRANSMIGRASI WARGA SIMPANG PASIR TAHUN 2025	DISNAKERTRANS
495	100.3.3.1/K.496/2025	24 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.496/2025 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026	DISNAKERTRANS
508	100.3.3.1/K.509/2025	31 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.509/2025 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029	DISPERINDAGKOP

Sumber: data Biro Hukum Setda Prov. Kaltim. Evidence yang dilampirkan berdasarkan metode systematic sampling.

**TABEL DATA (OUTPUT) BIRO HUKUM
SUBKEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM
DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2025**

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
1	1 Tahun 2025	02-Jan-25	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN BERMOTOR DAN OPSEN BEA CUKAI BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.	BAPENDA
15	15 Tahun 2025	19-Mar-25	PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH	DISDIK
29	26 TAHUN 2025	24-Jun-25	PENDIRIAN DAN REVITALISASI SEKOLAH UNGGULAN	DISDIK
43	40 TAHUN 2025	14 Agustus 2025	PENETAPAN KLASIFIKASI PEKERJA RENTAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM YANG MENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	BIRO KESRA

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
57	54 TAHUN 2025	07-Nov-25	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
71	100.3.3.1/K.11/2025	21 Januari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.11/2025 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024	BALITBANGDA
85	100.3.3.1/K.25/2025	11 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.25/2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL IBU KOTA NUSANTARA SEKSI 1B (SEGMENT BANDARA SEPINGGAN-TOL BALIKPAPAN SAMARINDA) KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BPOD
99	100.3.3.1/K.39/2025	19 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.39/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BIRO KESRA
113	100.3.3.1/K.53/2025	19 Februari 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.53/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMESARIS NON INDEPENDEN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2026	BIRO PEREKONOMIAN
127	100.3.3.1/K.67/2025	14 Maret 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.67/2025 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030	DISDIK
141	100.3.3.1/K.81/2025	19 Maret 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.81/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA	KESBANGPOL

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
			UANG DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2025	
155	100.3.3.1/K.94/2025	07 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.94/2025 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA MASA JABATAN 2025-2030	BIRO EKONOMI
169	100.3.3.1/K.108/2025	19 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K./2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DISHUT
183	100.3.3.1/K.122/2025	19 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.122/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH	DISPERINDAGKOP
197	100.3.3.1/K.136/2025	28 Mei 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.136/2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPPEDA
211	100.3.3.1/K.150/2025	17 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.150/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PERJALANAN RELIGI KEPADA MARBOT DAN PENJAGA RUMAH IBADAH NON MUSLIM	BIRO KESRA
225	100.3.3.1/K.164/2025	24 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.164/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUSNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV.KALTIM	ESDM

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
239	100.3.3.1/K.178/2025	24 Juni 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.178./2025 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	BPKAD
253	100.3.3.1/K.192/2025	21 Juli 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.192/2025 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF GURU, USTAD/USTADZAH DI KALIMANTAN TIMUR	KESRA
267	100.3.3.1/K.206/2025	23 Juli 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.206/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DISKOMINFO
281	100.3.3.1/K.220/2025	08 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.220/2025 TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	B. HUKUM
295	100.3.3.1/K.235/2025	19 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.235/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENDAPATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BAPENDA
309	100.3.3.1/K.249/2025	25 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.249/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA LAYANAN UMUM DAERAH	BIRO EKONOMI

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
323	100.3.3.1/K.263/2025	25 Agustus 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.263/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DISDIK
337	100.3.3.1/K.277/2025	10-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.277/2025 TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BIRO POD
351	100.3.3.1/K.291/2025	22-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.291/2025 TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN	BIRO ADBANG
365	100.3.3.1/K.305/2025	22-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.305/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR NEGERI TAHUN 2025	BIRO KESRA
379	100.3.3.1/K.319/2025	23-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.319/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGEMBANGAN DESA KORPORASI TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	PETERNAKAN
393	100.3.3.1/K.333/2025	26-Sep-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.333/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERENCANA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS, VETERAN, JANDA VETERAN, DAN LANJUT USIA TERLANTAR DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA INDIVIDU SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DINSOS
407	100.3.3.1/K.347/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.347/2025	BIRO EKONOMI

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
			TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA) PERIODE TAHUN 2025-2030	
421	100.3.3.1/K.361/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.361/2025 TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH SYLVA KALTIM SEJAHTERA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030	BIRO EKONOMI
435	100.3.3.1/K.375/2025	27 Oktober 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.375/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA AN. ABBAS	BKD
449	100.3.3.1/K.389/2025	11-Nov-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.389/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GERATISPOL PROGRAM AFIRMASI	BIRO KESRA
463	100.3.3.1/K.403/2025	28-Nov-25	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.403/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GRATISPOL	BIRO KESRA
477	100.3.3.1/K.417/2025	01 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.417/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029	BPBD
491	100.3.3.1/K.431/2025	01 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.431/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANTRI TANI TANAMAN PANGAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025	DINAS PANGAN
505	100.3.3.1/K.445/2025	09 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.445/2025 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.208/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS	DISDIK

NO	PERATURAN GUBERNUR		TENTANG	INSTANSI PENGUSUL
	NOMOR	TANGGAL		
			PEMBERIAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
519	100.3.3.1/K.460/2025	17 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.460/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELESI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2028	SETWAN DPRD
533	100.3.3.1/K.474/2025	17 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.474/2025 TENTANG PENGAKATAN DIREKTUR OPERASIONAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA) PERIODE TAHUN 2025-2030	BIRO EKONOMI
547	100.3.3.1/K.488/2025	24 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K./2025 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BERAU TAHUN 2026	DISNAKERTRANS
561	100.3.3.1/K.502/2025	24 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.502/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	BAPENDA
575	100.3.3.1/K.516/2025	31 Desember 2025	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.516/2025 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029	DISNAKERTRANS

Sumber: data Biro Hukum Setda Prov. Kaltim. Evidence yang dilampirkan berdasarkan metode systematic sampling.

**TABEL DATA (OUTPUT) BIRO HUKUM
FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA
TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2025**

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
1	180.1/HK- PERUU/I/2025 Tanggal 6 Januari 2025	Ranperkada	Kutai Kartanegara	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Sudah Fasilitasi
11	100.3/195/HK- TU.P/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Sudah Fasilitasi
21	140/P030225.1. 927/Hukum Tanggal 3 Februari 2025	Ranperkada	Mahakam Ulu	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
31	180/81/HK.1/II /2025 Tanggal 13 Februari 2025	Ranperkada	Berau	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025	Sudah Fasilitasi
41	100.3.2/435/TU -PIMP/HUK Tanggal 4 Maret 2025	Ranperkada	Penajam Paser Utara	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku	Sudah Fasilitasi
51	180/144/HK.1/ III/2025 Tanggal 19 Maret 2025	Ranperkada	Berau	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial	Sudah Fasilitasi
61	180.244/HK- PERUU/3/2025 Tanggal 26 Maret 2025	Ranperkada	Kutai Kartanegara	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Sudah Fasilitasi
71	100.3.2/0321/0 11.03 Tanggal 10 April 2025	Ranperkada	Samarinda	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Sudah Fasilitasi

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
81	100.3/P290425. 2.433//Hukum- TU.P Tanggal 29 April 2025	Ranperkada	Mahakam Ulu	Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Laporan PertanggungJawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan	Belum Fasilitasi
91	B/100.3.2/428/ HUK/2025 Tanggal 9 Mei 2025	Ranperkada	Bontang	Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
101	100.3.2/903/E/ SETDA Tanggal 28 Mei 2025	Ranperkada	Balikpapan	Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih	Sudah Fasilitasi
111	T- 400.10.2.4/475 5/SEKDA Tanggal 4 Juni 2025	Ranperkada	Kutai Timur	Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa	Sudah Fasilitasi
121	100.3.2/1149/T U-PIMP/HUK Tanggal 24 Juni 2025	Ranperkada	Penajam Paser Utara	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Petung Kecamatan Penajam	Sudah Fasilitasi
131	100.3.2/1375 /011.03 Tanggal 23 Juni 2025	Ranperkada	Samarinda	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Samarinda Tahun 2025-2045	Sudah Fasilitasi
141	100.3/2214/HK -TU.P/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Rencana Induk Pelabuhan Royoq	Sudah Fasilitasi
151	180/636/HK.I/ VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025	Ranperkada	Berau	Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil	Sudah Fasilitasi

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
161	100.3/2375/HK-TU.P/VII/2025 Tanggal 17 Juli 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Sudah Fasilitasi
171	100.3/P230725.3.047/Hukum-TU.P Tanggal 23 Juli 2025	Ranperkada	Mahakam Ulu	Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah	Sudah Fasilitasi
181	180/662/HK.1/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025	Ranperkada	Berau	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Sudah Fasilitasi
191	B/100.3.2/726/HUK/2025 Tanggal 4 Agustus 2025	Ranperkada	Bontang	Pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
201	180.524/HK-PERUU/8/2025 Tanggal 7 Agustus 2025	Ranperkada	Kutai Kartanegara	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggarong Tahun 2025-2044	Sudah Fasilitasi
211	180/707/HK.1/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025	Ranperkada	Berau	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
221	T100.3/1632/HKM Tanggal 21 Agustus 2025	Ranperkada	Paser	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029	Sudah Fasilitasi
231	100.3/2821/HK-TU.P/XI/2025 Tanggal 1 September 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
241	180/781/HK.1/ IX/2025 Tanggal 15 September 2025	Ranperkada	Berau	Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
251	180.656/HK- PUU/9/2025 Tanggal 16 September 2025	Ranperkada	Kutai Kartanegara	Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
261	B/100.3.2/968/ HUK/2025 Tanggal 25 September 2025	Ranperkada	Bontang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
271	180.690/HK- PERUU/20/202 5 Tanggal 6 Oktober 2025	Ranperda	Kutai Kartanegara	Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Kutai	Sudah Fasilitasi
281	100.3.2/3859/0 11.03 Tanggal 3 Oktober 2025	Ranperkada	Samarinda	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	Sudah Fasilitasi
291	100.3/P081025. 4.010/HUKUM- TU.P Tanggal 8 Oktober 2025	Ranperda	Mahakam Ulu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi	Sudah Fasilitasi
301	100.3/4725/HK -TU.P/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Belum Fasilitasi

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
311	100.3/4759/HK -TU.P/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bongan Tahun 2025- 2044	Sudah Fasilitasi
321	180/1292/HK.1 /X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025	Ranperkada	Berau	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025	Sudah Fasilitasi
331	T- 900.1.6.2/7436 /SEKDA Tanggal 6 November 2025	Ranperkada	Kutai Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sudah Fasilitasi
341	180/1360/HK.1 /XI/2025 Tanggal 20 November 2025	Ranperkada	Berau	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung	Sudah Fasilitasi
351	100.3/2923/E/ SETDA Tanggal 22 November 2025	Ranperkada	Balikpapan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Sudah Fasilitasi
361	100.3/4968/HK -TU.P/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Belum Fasilitasi
371	100.3.2/2837/T U- PIMP/SETDA- HUK Tanggal 28 November 2025	Ranperkada	Penajam Paser Utara	Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa	Sudah Fasilitasi
381	100.3/4975/HK -TU.P/XI/2025 Tanggal 28 November 2025	Ranperkada	Kutai Barat	Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Belum Fasilitasi

NO.	NOMOR/ TANGGAL SURAT	PERDA/PERKADA/ PER. DPRD	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
391	B/100.3.2./127 3/HUK/2025 Tanggal 27 November 2025	Ranperkada	Bontang	Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi di Daerah	Belum Fasilitasi

Sumber: data Biro Hukum Setda Prov. Kaltim. Evidence yang dilampirkan berdasarkan metode systematic sampling.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

Faktor pendorong:

- Tersedianya dana/anggaran penunjang kegiatan;
- Tersedianya regulasi yang jelas;
- Telah disusunnya rencana kerja tahunan subbagian;
- Tersedianya sistem informasi melalui website untuk program prioritas;
- Dukungan pimpinan terhadap program prioritas.

Faktor penghambat:

- Ketidakpatuhan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun;
- Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
- Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia penyusunan hasil (*output/outcome*) kinerja;
- Belum optimalnya sosialisasi program-program di biro kesejahteraan rakyat ke masyarakat;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi biro kesejahteraan rakyat;
- Program prioritas dapat terlaksana di TW IV karena permasalahan regulasi dan keuangan.

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong:

- Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi LPPD menjadi prioritas.

- Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Faktor penghambat:

- Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian;
- Kurangnya kesadaran koordinasi lintas sektor dan wilayah antar kabupaten/kota;
- Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong:

- Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi menjadi prioritas;
- Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Faktor penghambat:

- Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian;
- Kurangnya kesadaran koordinasi lintas sektor dan wilayah antar kabupaten/ kota;
- Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan terhadap fasilitasi kerja sama daerah menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah;
- Koordinasi yang efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota;
- Dukungan anggaran dan sarana dengan tersedia dana dan fasilitas untuk pendampingan, sosialisasi, dan evaluasi kerja sama.

Faktor penghambat:

- Komitmen dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk segera memfasilitasi/menindaklanjuti usulan kerja sama baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga/Badan Usaha Swasta;
- Proses fasilitasi kadang terkendala oleh perbedaan agenda antar pihak yang bekerja sama;
- Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM:

Faktor pendorong:

- Tersedianya sarana dan prasarana serta aturan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan;
- Pemenuhan Indeks Kepatuhan Daerah dan kewajiban melakukan fasilitasi Produk Hukum Daerah melalui aplikasi Kemendagri serta E-Perda.

Faktor penghambat:

- Usulan dari Perangkat Daerah terkadang terlambat menyampaikan kelengkapan dokumen (Naskah Akademik);
- Jaringan yang terkadang mengalami kendala sehingga proses upload pemberkasan usulan Rancangan Produk Hukum menjadi terhambat, batas waktu terhadap nomor surat pemberkasan surat permohonan dibatas hanya berlaku untuk 3 (tiga) hari sehingga ketika Notifikasi E Perda dikembalikan, proses surat permohonan fasilitasi harus diulang kembali.

f. Permasalahan

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

- Terdapat agenda kegiatan yang pelaksanaannya sudah terjadwalkan pada Triwulan I dan II, tidak dapat dilaksanakan karena terbentur dengan program prioritas sehingga baru bisa dilaksanakan pada Triwulan III dan IV;
- Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu pada tupoksi Biro, sehingga output kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;

- Tidak optimal dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
- Program prioritas baru dapat terealisasi pada triwulan IV.

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

- Masih terdapat Perbedaan Persepsi dalam Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci dan Pemahaman Definisi Operasional antara Tim Penyusun LPPD, Tim Reviu LPPD dan Tim Evaluasi LPPD;
- Terdapat Keterlambatan Waktu Perangkat Daerah mengumpulkan dokumen pendukung.

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi:

- Adanya Unsur kepentingan sektoral dan kewilayahan antar instansi;
- Keputusan Hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang membutuhkan waktu lebih lanjut melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi:

- Peningkatan Permintaan Kerja Sama yang signifikan dalam menunjang program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Terbatasnya pemahaman perangkat daerah dan badan usaha/perusahaan swasta terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kerja sama dan kebijakan pelaksanaan PDLN.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM:

- Proses harmonisasi mengalami kendala karena adanya SOP dari Kementrian Hukum dan HAM yang mewajibkan adanya proses pamarafan draf oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- Usulan rancangan Peraturan Gubernur tidak dapat diproses lebih lanjut belum melalui proses perencanaan;
- Pembahasan Ranperda terhambat karena ada Perangkat Daerah kurang proaktif dalam proses pembahasan;

- Fasilitasi Ranperda dan Ramperkada kadang ada keterlambatan dikarenakan advis teknis dari Perangkat Daerah yang terkait dengan materi Produk Hukum Daerah kabupaten/kota yang akan difasilitasi dan/atau di evaluasi;
- Ketidakhadiran perangkat daerah terkait pembahasan (rapat fasilitasi/evaluasi).

g. Solusi dan Upaya

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

Solusi:

- Penguatan perencanaan untuk tahun selanjutnya;
- Penguatan Monev Kinerja per Triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tersusun di RKT;
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesra;
- Mendorong inovasi Sumber Daya Manusia dengan memberikan ruang bagi ASN/Non ASN untuk membuat inovasi terobosan di subbagiannya masing-masing.

Upaya:

- Penyusunan RKT dan melakukan revisi jika terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- Penyusunan ToR Kegiatan mengacu pada tugas dan fungsi serta jelas tujuan yang akan didapat daerah kegiatan dimaksud;
- Memperkuat koordinasi antar individu, sub bagian dan kepala bagian serta dengan lintas bidang lainnya untuk memperoleh informasi yang kuat terkait kinerja dan dapat melakukan sinkronisasi kegiatan yang memerlukan dukungan bidang/subbagian lain;
- Sosialisasi secara langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*online*).

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

- Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi yang melibatkan Kepala Daerah beserta Tim Penyusun LPPD dan Tim Evaluasi LPPD (Kementerian Dalam Negeri);
- Memberikan pemahaman kepada pihak pengusul mengenai persyaratan dokumen usulan kerja sama dan PDLN sesuai dengan

ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019.

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi

- Sinkronisasi aturan pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan kewenangan;
- Meningkatkan koordinasi dalam pelayanan konsultasi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah dengan seluruh stakeholders;
- Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait Dokumen Pendukung.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi

- Meningkatkan Komitmen dan Koordinasi dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk segera memfasilitasi/menindaklanjuti usulan kerja sama baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga/Badan Usaha Swasta;
- Memberikan pemahaman kepada pihak pengusul mengenai persyaratan dokumen usulan kerja sama dan PDLN sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM

- Menyelenggarakan rapat koordinasi bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi untuk menyamakan paradigma terhadap mekanisme prosedur penyusunan produk hukum daerah;
- Melakukan edukasi kepada perangkat daerah pengusul produk hokum daerah untuk dapat menyampaikan usulan judul Ranprkada agar dimuat dalam PROPEMPERKADA;
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara aktif dengan perangkat daerah pemrakarsa;
- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi serta memantau dan komunikasi;

- Berkoodinasi ke Kabupaten/Kota untuk memenuhi kelengkapan beberapa dokumen persyaratan pada list data dukung ke aplikasi e-perda;
- Menghubungi perangkat daerah terkait untuk hadir dalam pembahasan.

3. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	95,00	97,50	102,63
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	78,00	89,57	114,83
4.	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	91,00	93,09	102,30

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2025
			2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6-1)*100)
1.	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	96,77	100,00	100,00	100,00	0
2.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	-	-	90,00	97,50	8,33
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	64,30	70,55	86,69	89,57	3,32
4.	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	97,24	96,63	95,20	93,09	-2,22

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	100,00	97,50	97,50
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	76,00	89,57	117,86
4.	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	92,00	93,09	101,18

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

- Biro Perekonomian memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk di tindaklanjuti di daerah dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran, dan lain-lain.
- Sumber data dalam perhitungan Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi TA. 2025 menggunakan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang memiliki formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi} = \frac{\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}} \right) \times 100\%}{1}$$

Tabel Rincian Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
1	Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro - Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Laporan Data Perkembangan Perekonomian Kaltim - Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro - Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Inflasi - Laporan Hasil Pengolahan Data untuk Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	5	1	Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro - Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Laporan Data Perkembangan Perekonomian Kaltim - Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro - Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Inflasi - Laporan Hasil Pengolahan Data untuk Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	5
2	Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah (UMKM) - Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) - Rapat Sosialisasi Penguatan Peran ASN dalam Upaya Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kegiatan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Rapat Koordinasi KDEKS Tahun 2025	1 1	2	Koordinasi Dalam Rangka Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Akad Massal KUR 800.000 Debitur Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) - Rapat Sosialisasi Penguatan Peran ASN dalam Upaya Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kegiatan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Rapat Koordinasi KDEKS Tahun 2025	1 1
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan Sosialisasi dan Fasilitasi Penerimaan <i>Participating Interest</i> 10% pada Wilayah Kerja Migas di Kaltim - Fasilitasi Pengusulan Geopark Sangkulirang Mangkalihat #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup - Fasilitasi Potensi Pengelolaan Sampah untuk Energi Terbarukan di Kaltim - Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Aduan Lingkungan Hidup	1 2	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan Sosialisasi dan Fasilitasi Penerimaan <i>Participating Interest</i> 10% pada Wilayah Kerja Migas di Kaltim - Fasilitasi Pengusulan Geopark Sangkulirang Mangkalihat #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup - Fasilitasi Potensi Pengelolaan Sampah untuk Energi Terbarukan di Kaltim - Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Aduan Lingkungan Hidup	1 2
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian - Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur - Koordinasi Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan (PEDA)	2	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian - Fasilitasi Penerbitan Surrat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pekan Daerah Petani Nelayan ke XI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 100.3.3.1/K.70/2025 tanggal 18 Maret 2025 - Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan (PEDA) Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat pada	2

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
	Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat			tanggal 21-27 Juni 2025	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan - Forum Konsultasi Publik Tingkat Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan Dokumen Indigenous People Plan (IPP) dan Revisi Benefit Sharing Plan (BSP) Program FCPF-CF EK-JERP - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Program FCPF-CF ke Desa/Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat - Penulisan Dokumen Rencana Pembagian Manfaat Versi 3.0 dan Dokumen Rencana Masyarakat Adat Program Result Based Payment Berbasis Yurisdiksi	3	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan - Forum Konsultasi Publik Tingkat Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan Dokumen Indigenous People Plan (IPP) dan Revisi Benefit Sharing Plan (BSP) Program FCPF-CF EK-JERP - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Program FCPF-CF ke Desa/Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat - Penulisan Dokumen Rencana Pembagian Manfaat Versi 3.0 dan Dokumen Rencana Masyarakat Adat Program Result Based Payment Berbasis Yurisdiksi	3
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan - Koordinasi terkait percepatan ijin Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Paser	1	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan - Koordinasi terkait percepatan ijin Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Paser	1
7	Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kaltim - Pengembangan Jargas Rumah Tangga di Kota Bontang	1	7	Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kaltim - Pengembangan Jargas Rumah Tangga di Kota Bontang	1
8	Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kaltim - Percepatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kutai Timur	1	8	Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kaltim - Percepatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kutai Timur	1
9	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air - Koordinasi dan Evaluasi dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sektor Mineral dan Batubara	1	9	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air - Koordinasi dan Evaluasi dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sektor Mineral dan Batubara	1
10	Forum Energi Daerah - Koordinasi Forum Energi Daerah untuk transisi energi dan pencapaian bauran energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur	1	10	Forum Energi Daerah - Koordinasi Forum Energi Daerah untuk transisi energi dan pencapaian bauran energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur	1
14	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5	14	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5
-	Bimtek Executive Leadership Program Peningkatan Pengelolaan Bisnis pada BUMD Provinsi Kalimantan Timur		-	Bimtek Executive Leadership Program Peningkatan Pengelolaan Bisnis pada BUMD Provinsi Kalimantan Timur	
-	Terbitnya Perubahan Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur (Perseroda)		-	Terbitnya Perubahan Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur (Perseroda)	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
-	Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2024 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2025 BUMD Kaltim		-	Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2024 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2025 BUMD Kaltim	
-	Terbitnya Perubahan Hukum PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT. Migas Mandiri Pratama (Perseroda)		-	Terbitnya Perubahan Hukum PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT. Migas Mandiri Pratama (Perseroda)	
-	Penjaringan Direksi untuk 5 BUMD Kalimantan Timur		-	Penjaringan Direksi untuk 5 BUMD Kalimantan Timur	
15	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	3	15	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	3
-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD Bidang Pendidikan (SMK) dan Pertanian		-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD Bidang Pendidikan	
-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD Bidang Kesehatan		-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)	
-	Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD		-	Evaluasi Laporan Keuangan TA 2024 dan Kinerja BLUD	
			-	Sosialisasi dan Pembinaan BLUD bidang Kesehatan	
			-	Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPK BLUD di Jakarta dan Yogyakarta di Kabu[at]en : Kutim, Bontang, Mahulu	
16	Pembentukan Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim	1	16	Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim	1
-	SK Gub Kaltim penetapan pengelolaan BLUD 2025 Nomor 100.3.3.1/K.142/2025		-	SK Gub Kaltim penetapan pengelolaan BLUD 2025 Nomor 100.3.3.1/K.142/2025	
17	Kebijakan Pengelolaan PPK BLUD	3	17	Kebijakan Pengelolaan PPK BLUD	3
-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah		-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah	
-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Hibah pada UPTD KKP3K KDPS		-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Hibah pada UPTD KKP3K KDPS	
-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola, Renstra dan SPM pada UPTD KKP3K KDPS		-	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola, Renstra dan SPM pada UPTD KKP3K KDPS	
18	Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan Kebijakan BUMD Air Minum Se Provinsi Kalimantan Timur	1	18	Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan Kebijakan BUMD Air Minum Se Provinsi Kalimantan Timur	1
-	Rapat Koordinasi Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air Bagi BUMD Air Minum Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur		-	Rapat Koordinasi Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air Bagi BUMD Air Minum Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur	
19	Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1	19	Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1
-	Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi		-	Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi	
-	Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah		-	Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
-	Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum		-	Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	
-	Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum		-	Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	
Total Target :		34	Total Realisasi :		34

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

- Biro Perekonomian Memfasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian termasuk juga terkait Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kalimantan Timur.
- Terdapat 7 dari 8 Badan Usaha Milik Daerah Kalimantan Timur yang ditargetkan pada APBD maupun APBD-P Tahun 2025 untuk kontribusi dalam Pendapatan Daerah.
- Biro Perekonomian dalam Capaian Indikator Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian menggunakan sumber data Laporan Setoran Pendapatan Daerah dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah, untuk formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nominal yang Disetorkan Per Target Menjadi PAD}}{\text{Jumlah Nominal Target}} \times 100\%$$

Tabel Realisasi Penerimaan Dividen BUMD TA. 2025

KODE REKENING	KOMPONAN PENERIMAAN	APBD TAHUN 2025 (Rp)	APBD - P TAHUN 2025 (Rp)	Realisasi 2025 s/d Per 30 Desember 2025	% APBD - P
4.01.03	I. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	449.309.792.556,00	377.458.223.634,00	368.004.360.120,00	97,50%
4.1.3.2.01	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD (LEMBAGA KEUANGAN)	379.414.841.661,00	285.653.278.493,00	285.653.278.493,00	100,00%
4.1.0.02.01.001	PT. BANK KALTIMTARA	379.414.841.661,00	285.653.278.493,00	285.653.278.493,00	100,00%
4.1.03.02.02	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD (ANEKA USAHA)	67.703.450.384,00	91.804.945.141,00	82.351.081.627,00	89,70%
4.1.03.02.02.001	PERUSDA "MELATI BHAKTI SATYA"	4.446.568.159,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00%
4.1.03.02.02.002	PERUSDA KEHUTANAN "SYLVA KALTIM SEJAHTERA"	30.000.000,00	49.800.000,00	7.307.593,00	14,67%
4.1.03.02.02.003	PERUSDA PERTAMBANGAN "BARA KALTIM SEJAHTERA"	20.016.724.060,00	19.409.924.184,00	24.330.362.431,90	125,35%

KODE REKENING	KOMPONAN PENERIMAAN	APBD TAHUN 2025 (Rp)	APBD - P TAHUN 2025 (Rp)	Realisasi 2025 s/d Per 30 Desember 2025	% APBD - P
4.1.03.02.02.004	PT. KETENAGALISTRIKAN	661.802.706,00	-	-	-
4.1.03.02.02.005	PT. MIGAS MANDIRI PRATAMA (PERSERODA)	40.466.691.741,00	55.834.869.525,00	40.000.000.000,00	71,64%
4.1.03.02.02.006	PT. JAMKRIDA	2.081.663.718,00	5.510.351.432,00	7.013.411.603,00	127,28%

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Target Renstra Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 adalah 78, untuk hasil penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 adalah 86,69, nilai tersebut di peroleh dari penghitungan yang di lakukan oleh LKPP sesuai dengan indikator, bobot dan formulasi penghitungan yang telah di tetapkan, indikator tersebut antara lain:

1. Indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari:

a) SIRUP

Formulasi penghitungannya adalah Nilai RUP SIRUP di bandingkan dengan nilai belanja PBJ, basis data yang di gunakan adalah data RUP TA 2025 yang di tarik pada 1 april 2025 dengan skor maksimal 10 (sepuluh).

b) e-Katalog

Formulasi penghitungannya adalah jumlah paket selesai dibandingkan dengan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (katalog elektronik) dengan skor maksimal 4 (empat), basis datanya adalah data katalog elektronik TA 2024 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2025.

c) Non eTendering/non ePurchasing

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data SPSE (transaksional dan pencatatan) dan RUP TA 2024 yang di tarik tanggal 31 Januari 2025.

d) eTendering

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data realisasi dan RUP TA 2024 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2025.

e) Toko daring

Formulasi penghitungannya adalah sudah pernah melakukan ePurchasing melalui toko daring dengan skor maksimal 1 (satu), basis data yang di gunakan adalah data toko daring TA 2024 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2025.

f) eKontrak

Formulasi penghitungannya adalah jumlah paket di catatkan dalam eKontrak di bandingkan jumlah paket transaksional dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data SPSE TA 2024 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2025.

2. Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dengan skor maksimal 30 dan bobot 30%

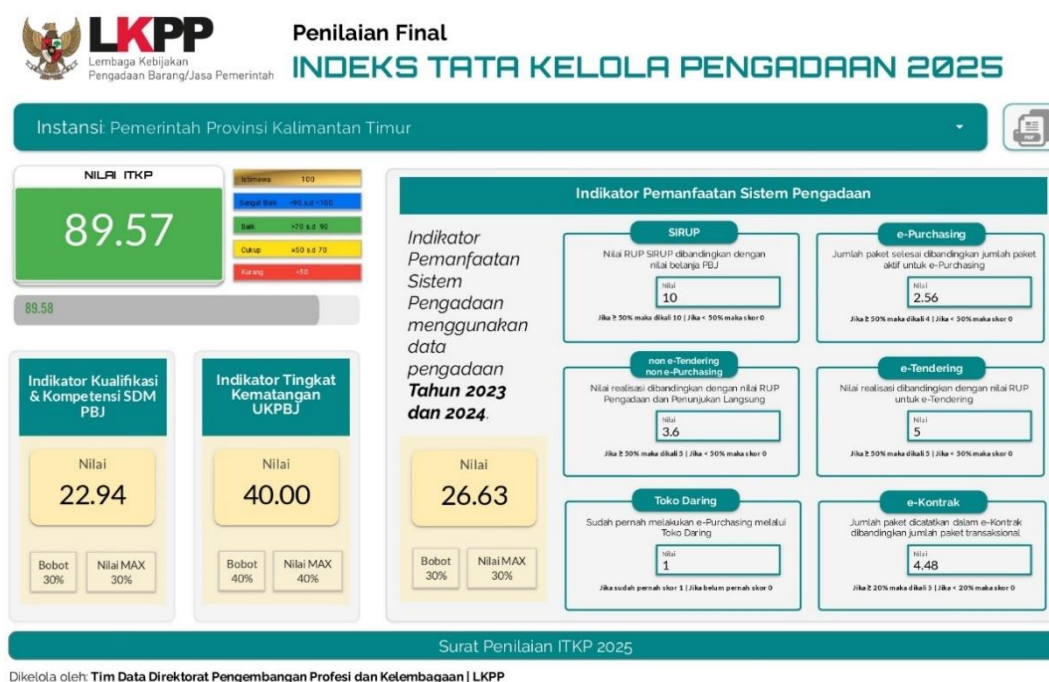
Variabel penilan terkait indikator tersebut adalah perencanaan SDM dan pengembangan SDM yang terdiri dari:

- Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM;
- Rekrutmen SDM pengadaan;
- Pengembangan kompetensi SDM PBJ; dan
- Peengelolaan kinerja SDM PBJ.

4. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan skor maksimal 40 dan bobot 40%

Indikator terkait tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain (domain proses, domain kelembagaan, domain SDM dan domain sistem informasi) dengan 9 variabel yang terdiri dari variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, pengorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM dan sistem informasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

Faktor pendorong: Komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan baik pada bidang kebijakan perekonomian maupun bidang sumber daya alam.

Faktor penghambat: Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau ketidakpastian dalam arah kebijakan yang mengganggu proses koordinasi dan mempengaruhi konsistensi dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Faktor pendorong: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, manajemen BUMD, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Faktor penghambat: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor pendorong:

- Fasilitasi dan dukungan sistem informasi yang memudahkan SKPD untuk mendapatkan hasil pencatatan RUP;
- Adanya regulasi terkait penambahan SDM melalui penerimaan PPPK;
- LKPP selalu membuka ruang koordinasi bagi instansi dalam pemenuhan bukti dukung penilaian indeks tata kelola pengadaan.

Faktor penghambat:

- Kemampuan SKPD untuk melakukan input RUP tidak maksimal sehingga masih ada RUP yang tidak tercatat di dalam aplikasi SIRUP;
- Belum terpenuhinya SDM JF PPBJ karena kewenangan terkait penambahan pegawai bukan kewenangan Biro PBJ;
- Ketatnya proses verifikasi dan penilaian bukti dukung oleh tim verifikator LKPP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

Faktor pendorong:

- Pentingnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD dan APBN Untuk Bahan Evaluasi Pimpinan;
- Pentingnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Bankeu Kab/Kota Untuk Bahan Evaluasi Pimpinan;
- Pentingnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Untuk Bahan Evaluasi Pimpinan.

Faktor penghambat:

- Belum optimalnya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah baik APBN maupun APBD;
- Belum optimalnya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Bankeu Kab/Kota;
- Belum optimalnya kualitas Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

f. Permasalahan

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

- Belum optimalnya Sinkronisasi Program/Kegiatan terkait dalam penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Keterbatasan kewenangan Biro Perekonomian selaku pembina BUMD.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- Rendahnya kepatuhan dan disiplin SKPD dalam sinkronisasi jadwal penginputan RUP secara tepat waktu;
- Ketidakseimbangan beban kerja (workload) akibat belum optimalnya pemenuhan formasi JF PPBJ yang berdampak pada risiko penurunan kualitas layanan pengadaan;
- Belum optimalnya penyamaan persepsi terhadap standar parameter dan kualitas bukti dukung yang disyaratkan dalam instrumen penilaian ITKP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

- Terjadi Keterlambatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Karena adanya Keterlambatan Administrasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pekerjaan;
- Setelah Kab/Kota Menerima Aliran Dana Bankeu, Untuk Pertanggung Jawaban hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Bankeu Kab/Kota masih belum optimal;
- Adanya Data yang mengharuskan dalam pelaporannya secara detail sehingga harus menggunakan Program Aplikasi.

g. Solusi dan Upaya

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

Mengadakan pertemuan dan konsultasi rutin antara semua pihak terkait untuk memantau kemajuan implementasi kebijakan, mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai, serta untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Peningkatan Capacity Building, mencari mitra untuk keterbatasan sumber keuangan, membuat inovasi dan kolaborasi dalam semua pemangku kepentingan pihak terkait.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- Melakukan verifikasi entrian RUP;
- Mendorong pemenuhan SDM serta meningkatkan pelatihan dan ujikom bagi SDM PBJ;
- Melakukan konsultasi secara intensif dengan LKPP selama masa proses pemenuhan bukti dukung dan penilaian ITKP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

- Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- Meningkatkan kualitas Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.13**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	80,00	78,38	97,97
2.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	86,00	86,60	100,70

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2025
			2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$(8=(7/6-1)*100)$
1.	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	89,19	97,30	81,08	78,38	-3,33
2.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	83,38	84,26	86,40	86,60	0,23

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.15**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6=5/4*100)$
1.	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	100,00	78,38	78,38
2.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	86,00	86,60	100,70

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

Realisasi Kinerja tahun 2025 **Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB (Sangat Baik)** adalah 78,38% dengan target kinerja 80,00% memperoleh capaian kinerja sebesar 97,97%.

Capaian kinerja ini menggambarkan bahwa ada sejumlah 29 Perangkat Daerah yang Predikat SAKIP-nya memperoleh hasil penilaian minimal BB (Sangat Baik) dari total jumlah 37 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025**

No.	Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi	Kategori/ Interpretasi
Kluster Utama:			
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,95	A
2	Inspektorat	80,95	A
3	Dinas Peternakan	80,65	A
4	Dinas Perkebunan	80,20	A
5	Dinas Sosial	75,55	BB
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM	75,40	BB
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	74,30	BB
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73,50	BB
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,95	BB
10	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	71,00	BB
11	Dinas Kesehatan	68,60	B
12	Dinas Pekerjaan Umum	66,60	B
13	Dinas Pariwisata	66,00	B
14	Satuan Polisi Pamong Praja	62,00	B
Kluster Pendukung:			
1	Dinas Kehutanan	76,40	BB
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75,20	BB
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	74,10	BB
4	Dinas Lingkungan Hidup	73,00	BB
5	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71,90	BB
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70,70	BB
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	70,60	BB
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70,45	BB
9	Dinas Perhubungan	69,40	B
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	66,30	B
Kluster Tambahan:			

1	Sekretariat Daerah	82,15	A
2	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	80,60	A
3	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	80,35	A
4	RSJD Atma Husada Mahakam	77,65	BB
5	RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Prov. Kaltim	76,75	BB
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	75,25	BB
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim	72,95	BB
8	Sekretariat DPRD	72,85	BB
9	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Prov. Kaltim	72,20	BB
10	Badan Penghubung Prov. Kaltim	71,30	BB
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim	70,25	BB
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	65,15	B
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim	60,70	B

**** Hasil Penilaian SAKIP 2025 oleh Inspektorat**

Predikat Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah
AA (Sangat Memuaskan)	0
A (Memuaskan)	7
BB (Sangat Baik)	22
B (Baik)	8
CC (Cukup / Memadai)	0
C (Kurang)	0
D (Sangat Kurang)	0
Jumlah Seluruh PD	37

**** Resume Hasil Penilaian SAKIP 2025**

Capaian Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **-3,33** dari tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian SAKIP minimal BB (Sangat Baik) sebanyak 30 Perangkat Daerah. Tahun 2025 menjadi 29 Perangkat Daerah.

Predikat Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah		% Kenaikan/ Penurunan
	2024	2025	
AA (Sangat Memuaskan)	0	0	
A (Memuaskan)	8	7	
BB (Sangat Baik)	22	22	

Predikat Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah		% Kenaikan/ Penurunan
	2024	2025	
Minimal BB (Sangat Baik)	30	29	-3.33
B (Baik)	6	8	
CC (Cukup / Memadai)	1	0	
C (Kurang)	0	0	
D (Sangat Kurang)	0	0	
Jumlah Seluruh PD	37	37	

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

Secara keseluruhan, capaian IKM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 86,60 menunjukkan bahwa layanan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, variasi antar biro mengindikasikan adanya area yang memerlukan perhatian khusus. Dengan melakukan evaluasi mendalam, penerapan *best practices*, serta pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan seluruh biro dapat berkontribusi secara optimal untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan layanan di masa mendatang.

e. Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

1) Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan Daerah untuk memperkuat penerapan SAKIP;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Faktor penghambat:

- Belum seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektorat;
- Variasi Kapasitas SDM antar perangkat daerah yang tidak merata dalam pemahaman SAKIP;
- Perubahan Instrumen Evaluasi oleh Inspektorat.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan dengan Adanya dukungan kuat dari Sekretaris Daerah dan Kepala Biro dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimum (SPM);
- Digitalisasi Layanan (SPBE) dengan Penggunaan aplikasi seperti sistem surat menyurat digital (SRIKADI) yang mempercepat alur birokrasi;
- Kompetensi SDM Staf administrasi, dan operasional yang telah tersertifikasi atau mendapatkan pelatihan pelayanan prima (service excellence);
- Transparansi Informasi dengan adanya kanal informasi yang jelas mengenai prosedur layanan di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim.

Faktor penghambat:

- Sarana prasarana terbatas beberapa fasilitas fisik yang memerlukan pemeliharaan intensif;
- Alur koordinasi yang panjang antar bagian di Sekretariat Daerah terkadang memicu keterlambatan respons.

f. Permasalahan

1) **Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB**

- Capaian indikator belum sepenuhnya memenuhi target Renstra. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB pada tahun 2025 baru mencapai 78,38%, masih terdapat selisih 1,62% dari target Renstra sebesar 80%, yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan kinerja pada sebagian Perangkat Daerah;
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP belum optimal. Belum seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat secara menyeluruh dan tepat waktu, sehingga perbaikan berkelanjutan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan nilai SAKIP;
- Variasi kapasitas dan kompetensi SDM antar Perangkat Daerah. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan aparatur dalam penerapan SAKIP, khususnya pada aspek

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan kinerja, yang mempengaruhi kualitas implementasi SAKIP;

- Adaptasi terhadap perubahan instrumen evaluasi SAKIP belum merata. Perubahan instrumen dan penekanan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat menuntut penyesuaian yang cepat, namun sebagian Perangkat Daerah masih memerlukan pendampingan untuk menyesuaikan dokumen dan proses bisnis kerjanya.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

- Keterlambatan Pemeliharaan Fasilitas, Keluhan mengenai kerusakan sarana kantor yang lambat ditangani.

g. Solusi dan Upaya

1) Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

- a) Penguatan pembinaan dan pengendalian penerapan SAKIP
Meningkatkan peran Sekretariat Daerah dan Inspektorat dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang belum mencapai predikat minimal BB.
- b) Optimalisasi tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP
Mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP secara terukur, dengan penetapan batas waktu dan pemantauan capaian secara berkala.
- c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola SAKIP
Melaksanakan bimbingan teknis, coaching clinic, dan pendampingan intensif terkait perencanaan kinerja, cascading kinerja, pengukuran kinerja, serta penyusunan LKjIP, terutama bagi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP di bawah BB.
- d) Pendampingan adaptasi terhadap instrumen evaluasi SAKIP terbaru
Menyediakan pedoman teknis, sosialisasi, dan pendampingan khusus terkait perubahan instrumen evaluasi SAKIP agar Perangkat Daerah dapat menyesuaikan dokumen dan implementasi kinerja sesuai ketentuan terbaru.
- e) Penguatan pemanfaatan teknologi informasi kinerja

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan sistem informasi kinerja secara terintegrasi untuk meningkatkan konsistensi, akurasi, dan kualitas data perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

- Survei Kepuasan *Real-Time* dengan Menyediakan QR Code di setiap titik layanan (seperti lobi, ruang rapat, dan meja administrasi) agar pengguna layanan bisa memberikan rating instan setelah dilayani;
- Pelatihan *Soft Skill* dengan mengadakan workshop Hospitality dan Professional Communication bagi garda terdepan.

4. Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.16

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	71,00	82,15	115,70
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50	86,46	101,13

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				%
			2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8=(7/6-1)*100)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	-	-	81,80	82,15	0,43
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,78	86,29	86,41	86,46	0,06

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.18**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	72	81,80	114,10
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86	86,41	100,53

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja Perangkat daerah, yang meliputi:

➤ Perencanaan Kinerja

Terhadap target kinerja yang tidak memenuhi kriteria achievable, menantang dan realistis misalnya saja EKPPD, pada RENSTRA 2024-2026 di drop, tidak lagi dipergunakan. Indikator kinerja yang dibuat

termasuk formulanya mengacu pada SMART-C. Disarankan kepada Biro-biro untuk membuat analisa dasar atau dalam pembuatan target, serta dalam RENSTRA dan RENJA dimuat sebagai kondisi awal. Dalam Akuntabilitas Kinerja atau LKjIP Tahun 2025 ini, analisis terhadap pencapaian dan kegagalan target dianalisa dengan lebih tajam dan komprehensif.

➤ Pengukuran kinerja

Pemberian *reward* dan *punishment* kepada bagian maupun individu pegawai. Setda Prov. Kaltim telah memiliki penghargaan “Best Employee”.

➤ Pelaporan Kinerja

Sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun; Informasi laporan kinerja berkala dalam hal ini setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi (monev) disertai penguatan analisis pada faktor pendukung, faktor penghambat, permasalahan, solusi dan upaya, diusulkan sebagai dasar penyesuaian anggaran yang tertuang pada APBD-P/P-RKPD.

➤ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya.

Tabel Penilaian SAKIP Setda Prov. Kaltim

No	Komponen Penilaian	Nilai Tahun					Peningkatan/ Penurunan Capaian 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Perencanaan Kinerja	20,39	23,75	22,20	30,00	30,00	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	13,75	15,00	14,80	15,40	21,30	5,90
3.	Pelaporan Kinerja	9,88	11,22	7,70	8,00	11,85	3,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3,84	6,85	14,00	14,80	19,00	4,20
5.	Capaian Kinerja	11,28	11,12	15,20	13,60		-
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		59.14	67.93	73.90	81.80	82.15	0.35
Kategori Penilaian		CC	B	BB	A	A	

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Jumlah responden Semester I yakni 88 orang, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,435 dengan mutu pelayanan berkategori B artinya memiliki kinerja unit pelayanan Baik. Nilai IKM ini merupakan rata-rata dari 15 Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Setelah dilakukan pengolahan data survei kepuasan masyarakat selama Semester I per responden sebanyak 88 responden dan per unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan terdapat nilai dan Jumlah responden semester II yakni 76 orang, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,463 dengan mutu pelayanan berkategori B artinya memiliki kinerja unit pelayanan Baik. Nilai IKM ini merupakan rata-rata dari 13 pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Setelah dilakukan pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat selama semester II per responden sebanyak 76 responden dan per unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan terdapat nilai rata-rata sebagai berikut:

1. Pendapat responden tentang pendapat kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,479;
2. Pendapat responden tentang kemudahan prosedur layanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,487;
3. Pendapat responden tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,434;
4. Pendapat responden tentang kewajaran/tarif dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,434;
5. Pendapat responden tentang pendapat kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dan dengan hasil yang diberikan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,461;
6. Pendapat responden tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,487;
7. Pendapat responden tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,421;
8. Pendapat responden tentang kualitas sarana dan prasarana pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,461;

9. Pendapat responden tentang penanganan pengaduan pengguna layanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,500.

Hasil Evaluasi/Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini yang dilakukan selama satu semester bulan Juli s/d Desember 2025, didapatkan responden sebanyak 76 orang dan berdasarkan jenis kelamin, yang banyak membutuhkan layanan Biro Administrasi Pimpinan adalah laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan 34 orang. Adapun berdasarkan profesinya, paling terbesar pengguna layanan adalah ASN (33 orang) kemudian swasta (2 orang), honorer (3 orang), wirausaha (2 orang), mahasiswa (16 orang), pelajar (4 orang), PPPK (16 orang), dan jika dilihat dari tingkat pendidikan responden maka Sarjana S1 (45 orang), SMA (22 orang), D3 (1 orang), dan S2 (8 orang) ini dapat diartikan bahwa responden umumnya para responden sudah berpendidikan tinggi.

Dengan kata lain, responden tersebut merupakan orang yang terdidik dan memiliki wawasan sangat baik. Dari 9 unsur pelayanan ini, terdapat 3 unsur pelayanan 3 terbawah yang perlu pembenahan, yakni **pendapat responden tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,434, pendapat responden tentang kewajaran/tarif dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,434, pendapat responden tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,421.**

Tiga unsur pelayanan terendah ditindaklanjuti dengan perbaikannya melalui rencana aksi/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan atas unsur layanan dengan nilai rata-rata 3 terendah, yakni dengan pembenahan waktu pelayanan agar lebih terukur, meningkatkan kompetensi staf pelaksana yang masih dianggap kurang dengan *in house training*, *coaching clinic*, bimtek, dan diklat yang diperlukan. Inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) juga dianggap relevan dalam perbaikan pelayanan;

2. Masukan dan saran dari responden akan dihimpun dan segera ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 3. Akan dilaksanakan pemantauan SKM dan survei yang akan dilakukan secara berkesinambungan per semester, sehingga analisa gambaran pelayanan dapat dilaksanakan sepanjang tahun;
 4. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP dengan mengundang responden/pengguna layanan terhadap 13 pengguna layanan pada Biro Administrasi Pimpinan.
- e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan (Sekertaris Daerah dan Kepala Biro) dalam setiap rencana aksi per triwulan yang dibuktikan dengan kehadiran dan Berita Acara;
- Sinergitas dengan biro-biro;
- Peningkatan Kompetensi SDM perencanaan dan pelaporan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten;
- Meningkatnya Pemahaman yang menyeluruh terhadap data dukung evaluasi SAKIP (4 Komponen).

Faktor penghambat:

- Masih belum semua Biro melengkapi pengisian E-Sakip, Ekin, Evdoren yang seharusnya menjadi data dukung dalam SAKIP;
- Tidak samanya persepsi bahwa pengisian data e-sakip menjadi tanggung jawab masing-masing ASN (bukan hanya Tata Usaha);
- Banyaknya aplikasi dengan *data base* yang sama (ego sektoral antara instansi);
- Berganti gantinya operator perencanaan dan pelaporan;
- Perubahan peraturan dalam evaluasi Sakip, banyaknya evidence yang harus dipenuhi dan tidak sama setiap tahunnya.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Faktor pendorong:

- Dilaksanakan SKM setiap semester sesuai dengan Permenpan RB No.14 tahun 2017;
- Banyaknya responden aktif dalam pengisian SKM;
- Standar Pelayanan yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi;
- Adanya hasil analisis terhadap 3 terendah IKM;
- Komitmen pimpinan hingga pelaksana dalam penyebaran informasi Standar Pelayanan maupun dalam pengisian SKM;
- Tersedianya Barcode SKM sehingga memudahkan pengguna layanan untuk mengisi.

Faktor penghambat:

- Pengisian Kuisioner pada SKM belum dianggap sebagai *tools* yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik;
- Kurangnya kesadaran ASN maupun Non ASN untuk sharing Kuisioner/*Barcode* kepada pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan;
- Laporan SKM masih dilakukan secara manual belum melalui aplikasi yang terintegrasi.

f. Permasalahan

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Banyaknya aplikasi yang belum diintegrasikan;
- Masih adanya *Mindset* bahwa penyusunan SAKIP adalah tugas Perencana;
- Tidak ada keberlanjutan perencanaan dan pelaporan dikarenakan adanya pergantian operator;
- Tidak ada pemenuhan data yang baku/sama setiap tahunnya.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

- Terlambatnya pelaksanaan forum konsultasi publik (sebagai TL tiga terbawah dalam IKM) yang berdampak pada tidak masuknya dalam laporan ke Menpan RB;
- Analisis yang kurang tajam terhadap laporan IKM (seolah-olah hanya pemenuhan dokumen semata);
- Kurang adaptifnya pelaksana (staf), terhadap aturan SKM dan FKP.

g. Solusi dan upaya

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Mengusulkan sinkronisasi dan integrasi aplikasi;
- Internalisasi hingga level pelaksana bahwa perencanaan dan pelaporan merupakan tanggung jawab individu;
- Melakukan *Coaching* secara terus menerus terhadap operator yang baru;
- Mengundang Evaluator dari inspektorat untuk mengadakan evaluasi terhadap SAKIP;
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana perencanaan/Analisis Perencana.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

- Membuat Rencana Aksi dan Milestone pelaksanaan FKP pada TW I atau II;
- Penajaman analisis pada IKM, jika memungkinkan dengan menggunakan analisa SWOT;
- Mengikuti sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan Biro Organisasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.19

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	98,99	81,77	17,22
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	76,23	62,43	13,80
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik Meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	99,34	85,46	13,88
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	108,42	99,24	9,18

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.20

Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasara Strategis Tahun 2025

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing				
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9.836.847.358,00	9.779.693.621,00	99,42
2	Program Kesejahteraan Rakyat	442.222.171.874,00	359.357.696.541,00	81,26
3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.359.824.944,00	2.951.063.173,00	87,83
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	991.124.918,00	946.229.915,00	100,00
		1.733.760.109,00	1.697.074.333,00	100,00
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.160.822.403,00	4.544.296.740,00	88,05
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	15.487.086.095,00	6.581.013.049,00	42,49
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK				
1	Program Penataan Organisasi	3.864.642.295,00	1.898.957.568,00	49,14
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	342.657.103.465,00	294.242.339.300,93	85,87
Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.488.515.538,00	24.301.776.387,00	99,24

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi Kinerja Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dikarenakan indikator kinerja level Perangkat Daerah tidak

akan mungkin sama dengan indikator kinerja level Gubernur/Provinsi, apabila sama maka tidak akan menunjukkan *cascade* kinerja.

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21**Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	Rp442.222.171.874,00	Rp359.357.696.541,00	81,26
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	Rp1.157.149.584.900,00	Rp11.503.713.578,00	99,41
		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00			
		Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00			
		Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	100,00	94,93	94,93	Rp3.359.824.944,00	Rp2.951.063.173,00	87,83
2	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	Rp2.724.885.027,00	Rp2.643.304.248,00	97,01
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95,00	97,50	102,63			
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	78,00	89,57	114,83	Rp8.885.223.750,00	Rp7.692.446.890,00	86,58
		Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	91,00	93,09	102,30	Rp15.487.086.095,00	Rp6.581.013.049,00	42,49
3	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	80,00	78,38	97,98	Rp3.864.642.295,00	Rp1.898.957.568,00	49,14
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	86,00	86,60	100,70	Rp342.657.103.465,00	Rp294.242.339.300,93	85,87
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,00	82,15	115,70	Rp24.488.515.538,00	Rp24.301.776.387,00	99,24
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	85,50	86,463	101,13			

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja dan Anggaran
per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				11.571.495.849	11.503.713.578	99,41	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87	87	100	1.734.648.491	1.724.019.957	99,39	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	140.520.000	133.830.000	95,24	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	140.520.000	133.830.000	95,24	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	26.963.488	26.400.000	97,91	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	7 Orang	100	26.963.488	26.400.000	97,91	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.471.705.446	1.469.022.997	99,82	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	100	69.988.358	69.988.341	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100	54.671.328	52.615.000	96,24	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1.347.045.760	1.346.419.656	99,95	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	40.982.057	40.756.980	99,45	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	40.982.057	40.756.980	99,45	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	5.091.500	4.900.000	96,24	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	5.091.500	4.900.000	96,24	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	-	-	0	0	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	49.386.000	49.109.980	99,44	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100	36.566.000	36.294.980	99,26	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	18 Unit	100	12.820.000	12.815.000	99,96	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100%	100%	100	9.836.847.358	9.779.693.621	99,42	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	100%	100	2.225.890.600	2.204.248.722	99,03	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.984.130.800	1.962.494.922	98,91	
Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	241.759.800	241.753.800	100,00	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	95%	100	6.727.719.672	6.692.580.003	99,48	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.792.346.000	1.761.575.202	98,28	
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4.509.045.173	4.505.098.801	99,91	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	100	426.328.499	425.906.000	99,90	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	100%	100	883.237.086	882.864.896	99,96	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	30 Dokumen	107 Dokumen	303,33	350.396.000	350.244.000	99,96	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	20 Dokumen	123 Dokumen	596.00	190.125.324	189.913.896	99,89	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	3 Laporan	100	342.715.762	342.707.000	100,00	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				443.845.198.606	360.760.878.797	81,28	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80	88,60	110,75	1.623.026.732	1.403.182.256	86,45	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	83,01%	87,03	339.807.430	297.116.700	87,44	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	12Dokumen	100	319.887.430	279.689.200	87,43	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12Laporan	12Laporan	100	19.920.000	17.427.500	87,49	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	32.767.320	21.967.200	67.04	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6Orang	28	467	32.767.320	21.967.200	67.04	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.056.824.382	911.913.622	86.29	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6Paket	6Paket	100	440.536.169	372.389.883	84.53	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12Paket	12Paket	100	58.000.000	51.748.400	89.22	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	12Laporan	100	558.288.213	487.775.339	87,37	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	20.000.000	13.200.000	66,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	12Laporan	100	20.000.000	13.200.000	66,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	173.627.600	158.984.734	91,57	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13Unit	13Unit	100	133.838.000	120.489.334	90,03	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38Unit	38Unit	100	39.789.600	38.495.400	96,75	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	100%	100%	100	442.222.171.874	359.357.696.541	81,26	
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100%	100%	100	151.541.524.006	141.042.531.704	93,07	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	250 Unit	250 Unit	100	91.459.197.920	88.951.843.707	97,26	
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	10 Lembaga	10 Lembaga	100	60.082.326.086	52.090.687.997	86,70	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	100%	100	288.237.574.687	216.123.680.848	74,98	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	287.207.889.067	215.279.984.307	74,96	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	495.000.320	412.327.527	83,30	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	12 Dokumen	100	534.685.300	431.369.014	80,68	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	100%	100	2.443.073.181	2.191.483.989	89,70	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1.168.689.984	1.019.189.131	87,21	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	100	824.418.297	757.550.135	91,89	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	449.964.900	414.744.723	92,17	
BIRO HUKUM				4.272.978.864	3.816.784.072	89,32	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	99.29%	99.29	913.153.920	865.720.899	94,81	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00	104.362.808	95.260.000	91,28	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	104.362.808	95.260.000	91,28	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100.00	8.122.808	4.480.000	55,15	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00	8.122.808	4.480.000	55,15	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00	30.000.000	20.920.724	69,74	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang	100.00	30.000.000	20.920.724	69,74	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	95.00%	95.00	619.001.304	598.386.826	96,67	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	30 Paket	100.00	70.546.843	66.357.088	94,06	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	20.00	11.480.461	2.550.000	22,21	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	100.00	536.974.000	529.479.738	98,60	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	100.00%	100.00	126.667.000	123.388.349	97,41	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100.00	126.667.000	123.388.349	97,41	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	100.00%	100.00	5.000.000	3.500.000	70,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.00	5.000.000	3.500.000	70,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	0.00	0	0	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	100.00%	100.00	20.000.000	19.785.000	98,93	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	100.00	20.000.000	19.785.000	98,93	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	100.00%	121.47%	121.47	3.359.824.944	2.951.063.173	87,83	
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100.00%	122.93%	122.93	1.759.928.434	1.602.258.722	91,04	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	35 Dokumen	60 Dokumen	171.43	605.932.988	578.846.211	95,53	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	500 Dokumen	519 Dokumen	103.80	171.244.634	162.318.000	94,79	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	600 Dokumen	579 Dokumen	96.50	382.546.812	375.886.860	98,26	
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	350 Dokumen	394 Dokumen	112.57	600.204.000	485.207.651	80,84	
Fasilitasi Bantuan Hukum	100.00%	120.00%	120.00	1.599.896.510	1.348.804.451	84,31	
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	10 Kasus	12 Kasus	120.00	1.113.830.120	981.857.317	88,15	
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	5 Kasus	6 Kasus	120.00	486.066.390	366.947.134	75,49	
BIRO PEREKONOMIAN				3.785.304.211	3.647.910.140	96,37	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82	82	100.00	1.060.419.184	1.004.605.892	94,74	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	100.00	130.914.000	121.760.000	100,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	130.914.000	121.760.000	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00	48.454.485	46.369.000	100,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 Paket	0	#DIV/0!	0	0	-	Terjadi Efisiensi pada Belanja Batik
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen	100.00	5.397.500	5.119.000	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41 Orang	41 Orang	100.00	43.056.985	41.250.000	100,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00	626.349.519	626.349.519	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	30 Paket	100.00	47.448.898	47.448.898	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100.00	11.520.000	11.520.000	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100.00	24.001.200	24.001.200	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	2.880.000	2.880.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	100.00	540.499.421	540.499.421	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00	190.034.617	166.106.000	100,00	
Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	100.00	7.134.234	6.800.000	100,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100.00	182.900.383	159.306.000	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00	14.425.264	14.419.000	100,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00	14.425.264	14.419.000	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00	43.083.000	29.602.373	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100.00	19.653.000	17.564.373	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	100.00	23.430.000	12.038.000	100,00	
	100%	100%	100.00	991.124.918	946.229.915	100,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	95%	95%	100.00	1.733.760.109	1.697.074.333	100,00	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.00	595.300.533	577.072.929	100,00	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	360.545.428	344.412.669	100,00	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	234.755.105	232.660.260	100,00	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	100.00	395.824.385	369.156.986	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	205.884.534	198.785.187	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	82.336.713	72.281.437	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	107.603.138	98.090.362	100,00	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1.733.760.109	1.697.074.333	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00	1.395.040.115	1.375.878.711	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	156.107.120	141.495.662	100,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	182.612.874	179.699.960	100,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	78 Indeks	89,57	114,83 Persen	8.885.223.750	7.692.446.890	86,58	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78 Indeks	85 Indeks	109 Persen	3.724.401.347	3.148.150.150	84,53	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	141.980.013	128.820.000	90,73	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	136.554.000	125.523.000	91,92	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	5.426.013	3.297.000	60,76	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.998.414	8.059.999	38,38	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100 Persen	873.41	810.00	92,74	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	10 Orang	100 Persen	20.125.000	7.250.000	36,02	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	100 Persen	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	883.773.830	826.630.649	93,53	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100 Persen	193.735.200	193.092.009	99,67	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100 Persen	49.369.730	35.628.000	72,17	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	100 Persen	640.668.900	597.910.640	93,33	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.056.068.766	1.689.607.217	82,18	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit	100 Persen	2.056.068.766	1.689.607.217	82,18	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	514.476.324	421.097.771	81,85	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	11.884.424	11.200.000	94,24	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	199.184.700	169.686.171	85,19	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	303.407.200	240.211.600	79,17	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	90 Persen	100 Persen	107.104.000	73.934.514	69,03	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100 Persen	2.000.000	0.00	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100 Persen	76.704.000	48.780.514	63,60	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit	100 Persen	28.400.000	25.154.000	88,57	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Level 3	Level 3	100 Persen	5.160.822.403	4.544.296.740	88,05	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Variabel	4 Variabel	100 Persen	2.460.521.488	2.146.192.364	87,23	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	260,285,176.00	235.342.552	90,42	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1.739.590.312	1.516.558.179	87,18	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	460.646.000	394.291.633	85,60	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Variabel	1 Variabel	100 Persen	1.426.923.800	1.368.024.899	95,87	
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	344.525.000	297.483.244	86,35	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	577.086.800	569.080.500	98,61	
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	505.312.000	501.461.155	99,24	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Variabel	4 Variabel	100 Persen	1.273.377.115	1.030.079.477	80,89	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	250 Orang	100 Persen	476.739.900	423.519.511	88,84	
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	398.729.900	303.096.364	76,02	
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	397.907.315	303.463.602	76,26	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				17.929.902.174	8.444.608.882	47,1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83Indeks	84,08 Indeks	101,3	2.442.816.079	1.863.595.833	76,29	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	224.928.000	186.771.858	83,04	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	224.928.000	186.771.858	83,04	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	149.812.100	145.291.421	96,98	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100	34.709.100	34.500.021	99,40	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15Orang	15Orang	100	102.453.000	100.073.300	97,68	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15Orang	15Orang	100	12.650.000	10.718.100	84,73	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82%	100%	121,95	1.216.073.119	946.304.457	77,82	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	100	125.810.744	110.283.411	87,66	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	9.999.740	8.730.000	87,30	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	1.080.262.635	827.291.046	76,58	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92%	100%	108,7	265.299.760	256.251.492	96,59	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	77 Unit	320,83	265.299.760	256.251.492	96,59	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82%	100%	121,95	326.727.100	217.278.500	66,50	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	0Laporan	0	2.000.000	0	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1Laporan	1Laporan	100	324.727.100	217.278.500	66,91	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	100%	117,65	259.976.000	111.698.105	42,96	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	100	55.136.000	39.003.055	70,74	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	100	176.440.000	53.495.600	30,32	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40Unit	40Unit	100	28.400.000	19.199.450	67,6	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	85%	50%	58,82	15.487.086.095	6.581.013.049	42,49	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85%	100%	117,65	1.013.371.480	4.718.883.758	34,83	
	85%	100%	117,65	12.535.392.408	4.718.883.758	34,83	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4Laporan	4Laporan	100	662.512.220	599.324.000	90,46	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4Laporan	4Laporan	100	350.859.260	300.422.155	85,62	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6Laporan	6Laporan	100	12.535.392.408	3.819.137.603	30,47	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85%	100%	117,65	1.938.322.207	1.862.129.291	96,07	
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1Dokumen	1Dokumen	100	325.360.000	307.344.048	94,47	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1Laporan	1Laporan	100	877.366.000	828.644.179	94,45	
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1Dokumen	1Dokumen	100	735.596.207	726.141.064	98,80	
BIRO ORGANISASI				5.393.612.456	3.137.417.407	58,17	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89,74 Indeks	90,83 Indeks	101,21	1.528.970.161	1.238.459.839	81,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	58,17%	58,17	124.918.580	111.340.000	89,13	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	124.918.580	111.340.000	89,13	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	7.265.220	5.367.500	73,88	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	7.265.220	5.367.500	73,88	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00%	0,00%	0,00	0	0	0,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92,00%	90,00%	97,83	809.523.832	598.322.876	73,91	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	81.714.397	69.869.919	85,51	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100	117.358.782	70.989.000	60,49	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	12.564.240	9.445.000	75,17	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100	137.433.000	10.939.999	7,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	342.400.000	321.220.958	93,81	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	118.053.413	115.858.000	98,14	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				517.880.529	463.544.497	89,51	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17 Unit	100	517.880.529	463.544.497	89,51	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				770.000	0	0,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	770.000	0	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.612.000	59.884.966	87,28	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100	53.832.000	51.016.272	94,77	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100	14.780.000	8.868.694	60,00	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				3.864.642.295	1.898.957.568	49,14	
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2.576.802.107	1.165.377.608	45,23	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	406.761.393	117.814.995	28,96	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.683.512.074	813.594.013	48,33	
Penataan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	486.528.640	233.968.600	48,09	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.287.840.188	733.579.960	56,96	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	398.541.805	166.143.765	41,69	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100	344.654.710	215.007.385	62,38	
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	100	167.963.186	57.048.335	33,96	
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	164.700.485	101.069.150	61,37	
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	100	211.980.002	194.311.325	91,66	
BIRO UMUM	86 Indeks	86,60 Indeks	100,70	342.657.103.465	294.242.339.300,93	85,87	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84,5 Indeks	94,1 Indeks	111.36	342.657.103.465	294.242.339.300,93	85,87	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	100	116.972.454.973	99.705.049.509	85,24	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang / Bulan	683 Orang / Bulan	100	115.233.903.561	98.206.359.509	85,22	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1.738.551.412	1.498.690.000	86,20	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	100	726.787.205	620.129.232	85,32	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	370.184.240	311.718.600	84,21	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	356.602.965	308.410.632	86,49	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	100	1.631.442.000	1.424.948.595	87,34	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100	580.851.000	569.280.000	98,01	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	100	870.591.000	676.022.195	77,65	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	100	180.000.000	179.646.400	99,80	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	100	33.148.840.916	32.242.590.955,33	97,27	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	100	1.189.087.525	1.172.787.593	98,63	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	9 Paket	100	560.954.434	420.383.014	74,94	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252 Paket	252 Paket	100	10.328.543.842	10.323.955.496	99,96	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket	100	919.770.345	870.866.710	94,68	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	3.213.872.300	3.148.288.500	97,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2638 Orang / Perjalan an	2638 Orang / Perjalan an	100	15.650.554.650	15.210.464.589,33	97,19	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	921.129.520	788.000.790	85,55	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	364.928.300	307.844.263	84,36	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	29.326.754.640	26.767.733.671	91,27	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	8.500.000.000	8.499.936.000	100,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	100	2.389.040.000	2.379.364.001	99,59	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	533 Unit	533 Unit	100	12.456.277.843	10.838.024.415	87,01	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	703 Unit	703 Unit	100	5.981.436.797	5.050.409.255	84,43	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	50.842.929.184	34.680.048.240	68,21	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	51.730.000	42.846.000	82,83	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	11.605.477.900	9.764.586.871	84,14	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	5.644.928.856	3.353.905.799	59,41	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	33.540.792.428	21.518.709.570	64,16	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	37.776.591.107	31.463.259.255.10	83,29	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52 Unit	52 Unit	100	652.278.000	651.830.000	99,93	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432 Unit	432 Unit	100	15.044.858.100	11.349.300.493	75,44	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995 Unit	995 Unit	100	2.140.047.632	1.711.409.754	79,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 Unit	13 Unit	100	19.658.097.375	17.544.128.627,10	89,25	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2602 Unit	2602 Unit	100	281.310.000	206.590.381	73,44	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100	18.090.531.915	17.518.598.867,50	96,84	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100	250.252.232	191.633.367	76,58	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Paket	24 Paket	100	879.660.000	867.051.240	98,57	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	100	435.000.000	347.933.420	79,98	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100	16.525.619.683	16.111.980.840,50	97,50	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	54.140.771.525	49.819.980.976	92,02	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	94 Paket	94 Paket	100	37.320.352.886	33.745.577.435	90,42	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	28 Paket	28 Paket	100	11.406.592.563	11.008.517.350	96,51	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	34 Paket	34 Paket	100	5.413.826.076	5.065.886.191	93,57	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				24.488.515.538	24.301.776.387	99,24	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90	95	105.56	24.488.515.538	24.301.776.387	99,24	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	100	742.044.000	722.361.007	97,35	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	100	468.200.000	455.948.394	97,38	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	273.844.000	266.412.613	97,29	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	90%	100	341.400.000	325.869.000	95,45	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	341.400.000	325.869.000	95,45	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	90%	100	617.268.000	603.319.352	97,74	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	100	244.468.000	230.662.252	94,35	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33	33	100	372.800.000	372.657.100	99,96	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	90%	100	1.126.063.249	1.108.812.416	98,47	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	10	100	155.043.449	140.523.000	90,63	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119	119	100	53.206.000	53.201.000	99,99	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150	150	100	46.557.000	46.490.000	99,86	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291	291	100	871.256.800	868.598.416	99,69	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	100	329.098.853	321.100.900	97,57	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	48	100	329.098.853	321.100.900	97,57	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	100	44.359.380	10.686.000	24,09	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	44.359.380	10.686.000	24,09	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-		-	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	100	156.107.704	153.853.983	98,56	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	100	145.727.000	144.668.983	99,27	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	14	100	10.380.704	9.185.000	88,48	
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100	18.860.808.673	18.790.458.398	99,63	
Penyiapan Materi Pimpinan	12	12	100	364.230.950	330.035.700	90,61	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100	10.842.673.054	10.812.230.089	99,72	
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12	12	100	7.653.904.669	7.648.192.609	99,93	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp) Pagu	(Rp) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi Keprotokolan	100%	100%	100	2.271.365.679	2.265.315.331	99,73	
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4	4	100	1.558.055.940	1.557.508.635	99,96	
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100	289.800.000	289.796.843	100,00	
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2	2	100	423.509.739	418.009.853	98,70	

Sumber: data Biro-biro tahun 2025 diolah

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026.

Dengan memperhatikan uraian dan data-data pada BAB III, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini telah disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.8.6.3/323/B.ADPIM.I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana surat tanggal 12 Agustus 2024 nomor : 700.1.2.1/2629/Itprov-II perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Sekretariat Daerah Provinsi. Kalimantan Timur Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :

Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.8.6.3/323/B.ADPIM.I/2025 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Sekretaris : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur.
10. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan);
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan);
3. Igo Febriansyah, S.STP. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan);
4. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan);
5. Darlene Putri Daryani, S.E (Pengelola Bahan Perencanaan)
6. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

NOTA DINAS

Yth. : Seluruh Kepala Biro di Lingkungan Setda Prov. Kaltim
Dari : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim
Tanggal : 21 Januari 2026
Nomor : 000.7.5/44/B.ADPIM.I/2026
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Undangan Pemenuhan Data LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan Eselon II pada Aplikasi e-SAKIP

Sehubungan akan diselenggarakannya kegiatan Pemenuhan Data LKjIP Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan Eselon II pada Aplikasi e-SAKIP, maka kami mengundang Bapak/Ibu pada

hari, tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
pukul : 09.00—Selesai
tempat : Ruang Rapat Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Brigjen Ery Suparjan No.20, Klandasan Ulu, Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kepada Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk membawa data kelengkapan LKjIP Tahun 2025 serta mengisi pada tautan <https://s.id/tabelkjiip2025-01> <https://s.id/tabelkjiip2025-02> serta <https://bit.ly/DATALKjIPTAHUN2025>.

Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Saudara Eduardo Heyko (085785932393)/Darlene Putri (082157416068).

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan,



Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19710808 199103 2 007

Lampiran
Tanggal : 21 Januari 2026
Nomor : 000.7.5/44/B.ADPIM.I/2026

JADWAL KEGIATAN

Pemenuhan Data LKjIP Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan Eselon II pada Aplikasi e-SAKIP

Hari, Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 22 Januari 2026	09.00—09.30	Registrasi Peserta	Panitia
	09.30—09.45	Pembukaan:	
		1. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Panitia
		2. Pembacaan Doa	Panitia
		3. Pembacaan Laporan Ketua Panitia	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
		4. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan	Kepala Biro Administrasi Pimpinan
	09.45—10.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	10.00—11.30	Pengumpulan Data LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2025	Moderator/masing-masing biro
	11.30—12.15	Diskusi/Tanya Jawab	Moderator
	12.15—13.30	Ishoma	Panitia
	13.30—15.00	Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan Eselon II pada Aplikasi e-SAKIP	Moderator/masing-masing biro
	15.00—15.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	15.15—16.15	Diskusi/Tanya Jawab	Moderator
	16.15—16.30	Penutupan	Panitia

Kepala Biro Administrasi Pimpinan,



Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19710808 199103 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

NOTULA

Rapat : Pemenuhan Data LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan II pada Aplikasi e-SAKIP

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026

Waktu Rapat : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 20, Balikpapan

Pimpinan Rapat

Ketua : Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si

Pencatat : Eduardo Heyko, M.Si

Peserta Rapat : Terlampir

Hasil Kegiatan Rapat:

- 1) Kegiatan Pemenuhan Data LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Pengisian Realisasi IKU Eselon I dan II pada Aplikasi e-SAKIP dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan.
- 2) Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan, Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Arahan dan sambutan disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ir. H. Irhamsyah, ST., M.T. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun kelengkapan data LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan realisasi IKU pada aplikasi e-SAKIP. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan komponen pelaporan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disampaikan juga nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin, dari sebelumnya 81,80 (A) tahun 2023 menjadi 82,15 (A) pada tahun 2024, dimana Sekretariat Daerah menjadi Perangkat Daerah dengan nilai AKIP tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024.
- 4) Hasil diskusi:

- a) Data yang digunakan berdasarkan Kertas Kerja pada Spreadsheet tabel data pada tautan: <https://bit.ly/DATAKjIPTAHUN2025>.
- b) Data-data kelengkapan LKjIP pada kertas kerja spreadsheet belum terisi lengkap dan masih proses pengisian oleh biro-biro.
- c) Realisasi kinerja Sekretaris Daerah (sebagai Kepala Perangkat Daerah) tahun 2025 pada aplikasi e-SAKIP telah diisi lengkap, namun masih perlu melengkapi bukti dukung dari biro-biro, khususnya pada indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan.
- d) Realisasi kinerja para Asisten pada aplikasi e-SAKIP sebaiknya diisi oleh biro-biro yang berada di bawah masing-masing Asisten agar bahasa kinerja yang dituangkan lebih berkualitas, dengan tetap berkoordinasi dengan ADC masing-masing Asisten.
- e) Pembahasan:
 - 1. Biro POD
 - Dokumen Kerja Sama Daerah
 - Dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD
 - Nilai EKPPD tahun 2023 baru disampaikan oleh Kemendagri pada tahun 2025
 - Rekapitulasi Camat Berprestasi
 - Kolaborasi dengan Biro Kesra berkaitan dengan program prioritas
 - 2. Biro Kesejahteraan Rakyat
 - Pergub dan Kepgub mengenai program Gratispol dan Jospol
 - Faktor pendorong: berupa dukungan pimpinan terhadap program prioritas
 - Faktor penghambat: terkait dengan regulasi pelaksanaan program prioritas
 - Permasalahan: pelaksanaan program prioritas baru dapat direalisasikan pada triwulan IV
 - 3. Biro Hukum (tidak hadir)
 - 4. Biro Perekonomian (tidak hadir)
 - 5. Biro PBJ
 - Bukti dukung sama seperti tahun lalu
 - Pengisian tabel-tabel sudah lengkap

6. Biro Administrasi Pembangunan
 - ACKPD triwulan I s.d. IV tahun 2025
 - Melengkapi pengisian tabel-tabel, terutama realisasi anggaran yang belum terisi
 7. Biro Organisasi
 - Bukti dukung sama seperti tahun lalu
 - Melengkapi pengisian tabel-tabel, terutama realisasi anggaran yang belum terisi
 8. Biro Umum
 - Bukti dukung IKM minta dari seluruh biro
 - Rekapitulasi sertifikasi kompetensi SDM
 - Faktor pendorong: pelaporan yang tepat waktu; pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; digitalisasi SKM
 - Permasalahan:
 9. Biro Administrasi Pimpinan
 - Bukti dukung sama seperti tahun lalu
 - Pengisian tabel-tabel sudah lengkap
- f) Berkaitan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, bisa dilaksanakan jadi satu Setda (tidak masing-masing biro), namun terkendala keterbatasan waktu dalam menindaklanjuti seluruh komplain (jika tidak spesifik), efisiensi anggaran, dan Berita Acara yang tidak ditindaklanjuti (jika hasil Berita Acara masih sama seperti tahun sebelumnya).
 - g) Hasil FKP wajib dimasukkan ke dalam PPID.
 - h) Kendala dengan PPID adalah masing-masing biro wajib memiliki website, namun masih ada biro yang belum memiliki website, misalnya Biro POD dan Biro Adpim.
 - i) Berkaitan dengan data untuk Rancangan Awal (Ranwal) Renja Tahun 2027, matriks kertas kerja rincian belanja diserahkan ke Bappeda paling lambat pada tanggal 23 Januari 2026.
 - j) Beberapa biro telah selesai menyusun matriks kertas kerja rincian belanja dan melakukan input data di aplikasi SIPD-RI.

Kesimpulan:

1. Bukti dukung dan data pelengkap LKjIP lainnya akan segera disampaikan oleh masing-masing biro kepada Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan.
2. LKjIP Tahun 2025 harus sudah selesai sebelum tanggal 5 Februari 2026.
3. Biro-biro akan segera melengkapi bukti dukung realisasi kinerja Sekretaris Daerah dan para Asisten pada aplikasi e-SAKIP.

Demikian notula ini dibuat untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Pimpinan Rapat,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian,



Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP 19700805 199203 2 016

DOKUMENTASI KEGIATAN







